

**ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI, URBANISASI, DAN INVESTASI
TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN**

Disusun Oleh :

LUTHFI ANSHORI

145020101111026



KONSENTRASI SUMBER DAYA

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh Aglomerasi, Urbanisasi, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten"

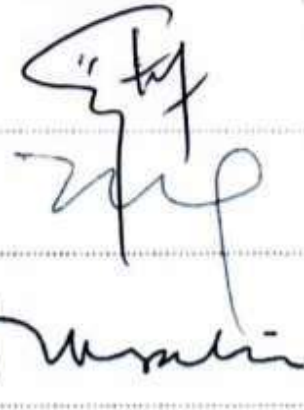
Yang disusun oleh :

Nama : Luthfi Anshori
NIM : 145020101111026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Sumber Daya

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **31 Maret 2021** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Setyo Tri Wahyudi, SE., MEc., Ph.D.
NIP. 198107022005011002
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.
NIP. 195503221981031002
(Dosen Penguji I)
3. Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si.
NIP. 196311161990021001
(Dosen Penguji II)



Malang, 4 Juni 2021
Ketua Program Studi
S1 Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI, URBANISASI, DAN INVESTASI TERHADAP
KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN**

Yang disusun oleh :

Nama : Luthfi Anshori
NIM : 145020101111026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.


Malang, 10 Maret 2021
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,

Dosen Pembimbing,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001



Setyo Tri Wahyudi, SE., MEd., Ph.D.
NIP. 198107022005011002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama	Luthfi Anshori
Tempat, tanggal lahir	Jakarta, 25 Agustus 1996
NIM	145020101111026
Jurusan	Ilmu Ekonomi
Program Studi	S1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	Ekonomi Sumber Daya
Alamat	Jl. Soekarno Hatta No.2, Jatimulyo Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI, URBANISASI, DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN .

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dan Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesajaranaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Maret 2021

Yang memhuat pernyataan,

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Setyo Tri Wahyudi, SE., MEc., Ph.D.
NIP. 198107022005011002



Luthfi Anshori
NIM. 145020101111026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
NIP. 196503111989032001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Pengaruh Aglomerasi, Urbanisasi, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten**. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta, serta saudara-saudara penulis yang tidak lelah dalam memberikan suntikan semangat.
2. Bapak Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Maryunani, SE., MS. dan Bapak Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si. selaku dosen penguji yang bersedia memberikan saran dan perbaikan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
6. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

7. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 9 Juni 2021

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Halaman Abstraksi	xii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1. Landasan Teori dan Konsep.....	9
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	9
2.1.2 Ketimpangan Regional.....	11
2.1.3 Aglomerasi.....	18
2.1.4 Urbanisasi.....	19
2.1.5 Investasi.....	20
2.1.6 Keterkaitan Aglomerasi dengan ketimpangan wilayah.....	21
2.1.7 Keterkaitan Urbanisasi Dengan Ketimpangan Antar wilayah.....	22
2.1.8 Keterkaitan Investasi Dengan Ketimpangan Antar wilayah.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu.....	24
2.3. Kerangka Hipotesis.....	28
2.4. Hipotesis Penelitian.....	28



BAB III Metode Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian..... 29

3.2 Jenis Penelitian..... 29

3.3 Variabel Penelitian..... 30

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel..... 30

3.5 Data Penelitian..... 32

3.6 Metode Penelitian..... 33

 3.6.1 Regresi Data Panel..... 33

 3.6.2 Metode Analisis Data Panel..... 33

 3.6.3 Uji Menentukan Data Panel..... 35

 3.6.4 Uji Hipotesis..... 36

BAB IV Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... 38

 4.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Provinsi Banten..... 38

 4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten..... 41

 4.1.3 Industri..... 44

 4.1.4 Infrastruktur Dan Transportasi Cost..... 47

4.2 Hasil olah Data..... 48

 4.2.1 Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Banten..... 49

 4.2.2 Aglomerasi antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Banten..... 50

 4.2.3 Urbanisasi antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Banten..... 52

 4.2.4 Investasi antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Banten..... 53

4.3 Hasil Estimasi..... 55

 4.3.1 Pemilihan Model..... 55

4.4 Pembahasan Hasil Temuan..... 56

 4.4.1 Uji Statistik Analisis Regresi..... 56

 4.4.2 Analisa Hubungan Variabel Bebas..... 62

 4.4.2.1 Pengaruh Aglomerasi terhadap Ketimpangan..... 62



4.4.2.2 Pengaruh Urbanisasi terhadap Ketimpangan.....	65
4.4.2.3 Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan.....	67
4.5 Implikasi Hasil Penelitian.....	70
BAB V Kesimpulan dan Saran	
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran Penelitian Lanjutan.....	73
Daftar Pustaka.....	75
Daftar Lampiran.....	78



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2019	3
Tabel 1.2 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2019	5
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2018	39
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2019	41
Tabel 4.3 PDRB Provinsi Banten ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2019 (juta Rupiah)	42
Tabel 4.4 Jumlah Industri Pengolahan di Provinsi Banten Tahun 2014-2019	44
Tabel 4.5 Panjang Dan Persentase Jalan Di Provinsi Banten Tahun 2014 2019.....	48
Table 4.6. Summary Data Panel Regression Model.....	56
Table 4.7. Uji Lanjut Pemilihan Model Regresi Data Panel dengan Uji Chow dan Uji Hausman	56
Tabel 4.8. Uji Parsial pada masing-masing variable.....	57
Tabel 4.9. Nilai konstanta Model Fixed Effect	58
Tabel 4.10. Unobserved Factor Model Fixed pada masing-masing Sampel	60
Tabel 4.11. Nilai Ketimpangan Actual dan Model Fixed pada masing-masing Sampel.....	61



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	2
Gambar 1.2 Indeks Williamson.....	4
Gambar 1.3 Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha.....	6
Gambar 1.4 Perkembangan Nilai Investasi (PMDN+PMA).....	7
Gambar 2.1 Kurva Kuznets.....	24
Gambar 2.2 Kerangka Hipotesis.....	28
Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Banten.....	38
Gambar 4.2 Presentase Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.....	40
Gambar 4.3 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.....	43
Gambar 4.4 Sebaran Tenaga Kerja Industri Kabupaten/Kota Provinsi Banten.....	46
Gambar 4.5 Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.....	49
Gambar 4.6 Aglomerasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2014-2019.....	51
Gambar 4.7 Urbanisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2014-2019.....	52
Gambar 4.8 Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2014-2019.....	54



Halaman Abstraksi

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Kuantitatif Yang Dilakukan Untuk Mengetahui Pengaruh Dari Aglomerasi, Urbanisasi, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten. Penelitian Ini Menggunakan Data Sekunder Yang Diperoleh Peneliti Melalui Situs Resmi Milik Pemerintah Republik Indonesia Yaitu Badan Badan Pusat Statistik yang merupakan gabungan data time series tahun 2014-2019 dan cross section pada 8 (delapan) kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Metode Analisis Yang Digunakan Pada Penelitian Ini Adalah Analisis Data Panel Dengan Model Regresi Fixed Effect Dan Alat Analisis E-Views 9.0 Dari Hasil Analisis Yang Telah Dilakukan, Dapat Diketahui Bahwa variabel aglomerasi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Sedangkan variabel Urbanisasi dan Investasi memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten. Kedua variabel ini memiliki arti bahwa peningkatan urbanisasi dan investasi di Provinsi Banten cenderung meningkatkan ketimpangan antar Kabupaten/Kota.

Kata kunci: Aglomerasi, Urbanisasi, Investasi, Ketimpangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa (Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3)). Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3).

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi: 2011:9-11).

Tujuan pokok dari usaha pembangunan ekonomi ialah disamping mencipatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga harus menghilangkan ataupun meminimalisir tingkat kemiskinan, kesenjangan *income* dan tingkat pengangguran (Todaro and Smith, 2014). Namun demikian pada kenyataannya tujuan tersebut sulit untuk dicapai bersama karena pada kenyataannya, strategi pembangunan saat ini merujuk pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan berbagai hasil pembangunan. Menurut Arsyad (2015) pertumbuhan dan pemerataan adalah dua kutub strategi pembangunan yang terkadang saling mengabaikan. Maksudnya, pembangunan

yang memfokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi cenderung akan “mengorbankan” aspek pemerataan, begitupun sebaliknya. Dengan tidak meratanya pembangunan memunculkan ketimpangan atau kesenjangan.

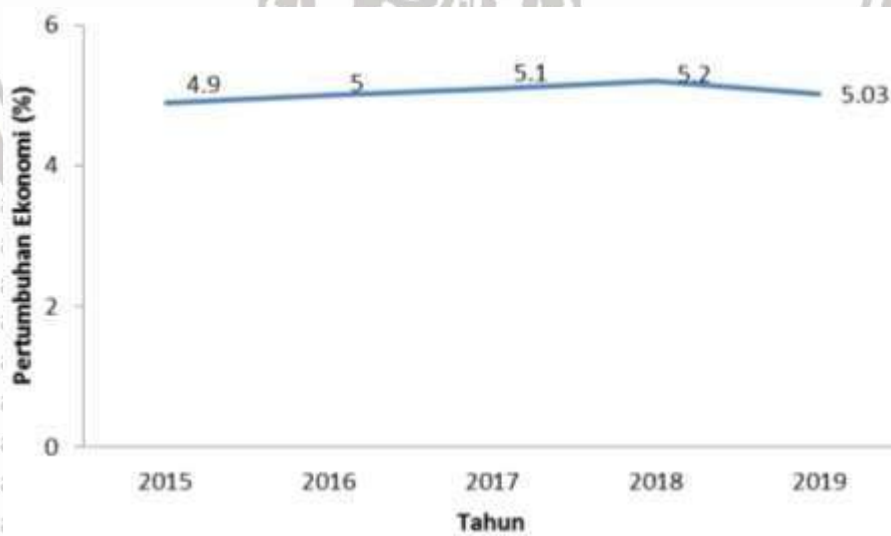
Pembangunan ekonomi saat ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi negara sedang berkembang. Hal ini didorong semangat untuk mengejar ketertinggalan negara sedang berkembang dibanding dengan negara maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah:

1. Akumulasi capital
2. Pertumbuhan penduduk
3. Kemajuan teknologi.



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 - 2019
Sumber: BPS (2020b)

Gambar 1.1 menunjukkan jika Indonesia pertumbuhan ekonomi selalu tumbuh positif yang artinya bahwa pembangunan telah membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan dapat dianggap bahwa tujuan pembangunan berhasil dicapai. Akan tetapi, pada indikator lainnya menunjukkan hal yang berbeda.

Menurut Hussuen (2019), angka ketimpangan di Indonesia masih sangat besar dimana kemiskinan di daerah timur Indonesia adalah 18.01%, daerah barat Indonesia 10.33% dan perkotaan 7.02%. sedangkan ketimpangan pendapatan di pedesaan adalah 0.324% dan perkotaan 0.4%.

Banten sebagai salah satu provinsi termuda di Pulau Jawa juga mempunyai keberhasilan pembangunan ekonomi yang baik jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang didekati dengan laju pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi yang positif juga terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Meskipun besaran pertumbuhannya berbeda antar Kab/Kota, tetapi terdapat dua daerah yang selalu mempunyai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi yakni Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan (Tabel 1.1).

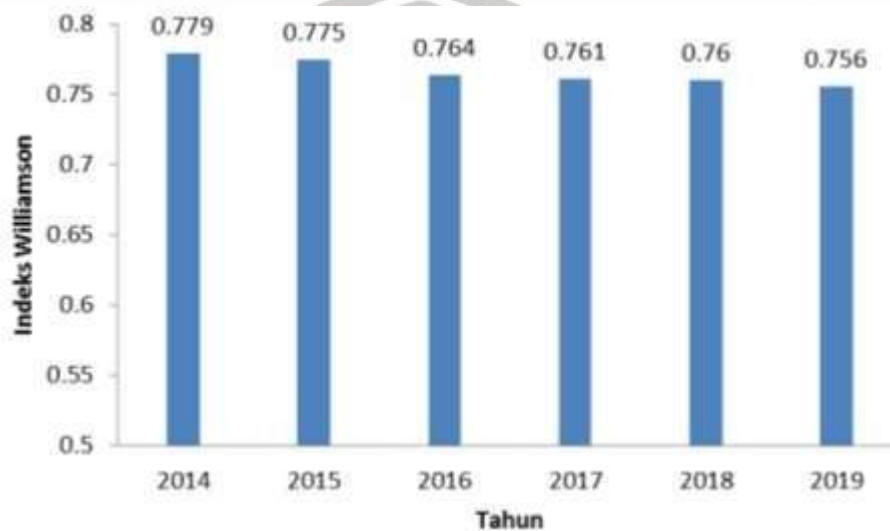
Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Pandeglang	5.81	5.52	6	6.02	5.04
Kab. Lebak	6.2	5.57	5.76	5.8	5.77
Kab. Tangerang	5.6	5.41	5.82	5.93	5.88
Kab. Serang	5.09	5.09	5.22	5.33	5.08
Kota Tangerang	5.37	5.34	5.88	5.92	4.31
Kota Cilegon	4.75	5	5.5	5.97	5.65
Kota Serang	6.35	6.33	6.43	6.46	6.44
Kota Tangsel	7.25	6.74	7.3	7.37	7.35
Banten	5.61	5.51	5.93	6.07	5.54

Sumber: BPS (2020b)

Tabel 1.1 bisa dijadikan indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Banten jika ditinjau dari indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi pada sisi lain

indikator ketimpangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil penelitian Damayanti (2017) memperlihatkan jika taraf kesenjangan antar wilayah di Provinsi Banten ialah yang paling tinggi dari pada provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Indeks Williamson (IW) yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Banten masih tinggi ($IW > 0,5$) tetapi cenderung turun (Gambar 1.2)



Gambar 1.2 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Banten Tahun 2014 - 2019

Sumber: (BPS, 2020a)

Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Banten juga dapat dilihat berdasarkan timpangnya pendapatan perkapita antar kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Tabel di atas memperlihatkan jika pendapatan per kapita pada Tahun 2018 Provinsi Banten Rp 48,46 juta dengan pendapatan tertinggi yaitu Kota Cilegon yang mencapai Rp 223,95 juta dan terendah Kabupaten Lebak yang hanya mencapai 20,66 juta atau hanya 9,2% pendapatan perkapita Kota Cilegon.

Tabel 1.2 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten
Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	15,31	17,02	18,46	20,09	21,89	16.41
Kab Lebak	14,76	16,28	17,60	19,04	20,66	22.2
Kab Tangerang	27,99	30,13	31,39	33,21	35,25	37.29
KabSerang	35,07	38,45	41,27	44,14	47,71	51.01
Kota Tangerang	54,98	60,90	64,99	69,79	75,02	78.58
Kota Cilegon	172,09	187,47	196,84	209,05	233,95	238.44
Kota Serang	31,14	33,96	36,53	39,69	42,95	46.12
Kota Tangerang Selatan	33,53	36,30	38,09	41,31	44,35	47.4
Provinsi Banten	36,629	40,028	42,311.	45,26	48,46	51.77

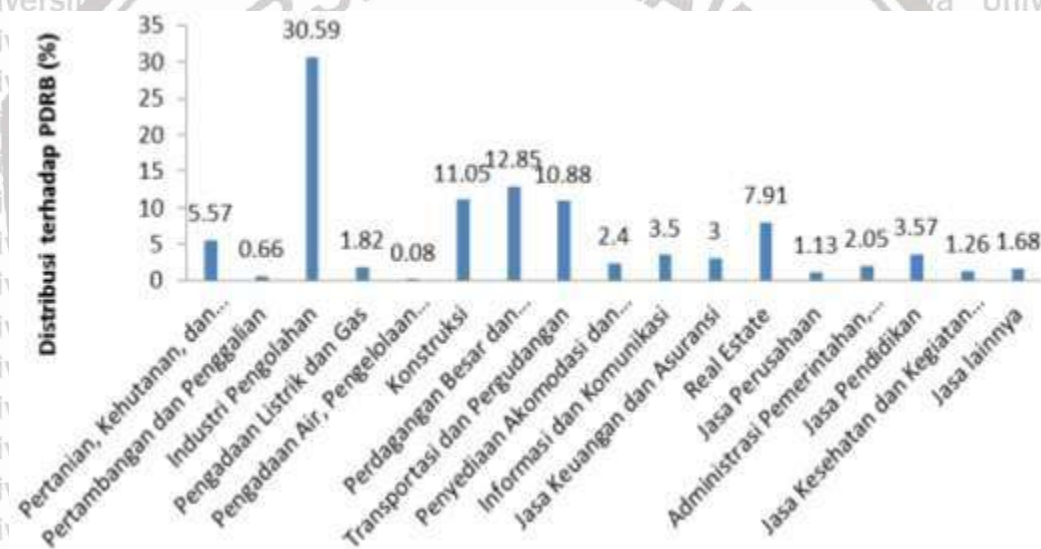
Sumber: BPS (2020b)

Ketimpangan antar wilayah harus dikurangi karena ketimpangan dalam bentuk dan dimensi apa pun merupakan faktor perusak utama bagi pembangunan berkelanjutan (Kaya and Koc, 2019). Dengan pengurangan ketimpangan diharapkan dapat menghindari dampak negatifnya diantaranya yaitu ketidakefisienan ekonomi, memperlemah kestabilan sosial dan solidaritas, serta kesenjangan dinilai sebagai bentuk ketidakadilan (Todaro and Smith, 2014).

Terjadinya kesenjangan antar wilayah tersebut berimplikasi pada taraf kemakmuran masyarakat antar daerah, yang bisa mengganggu stabilitas keamanan Negara akibat kecemburuan masyarakat khususnya masyarakat daerah dengan taraf kemakmuran yang lebih rendah (Bappenas, 2017). Salah satu dampak negatif ketimpangan dibuktikan oleh hasil penelitian Hariani & Syahputri (2016) yang menyimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh terhadap stabilitas sosial khususnya tingkat kriminalitas.

Untuk dapat membuat strategi dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah maka diperlukan pengetahuan dan bukti empiris tentang faktor yang mempengaruhi ketimpangan di wilayah yang bersangkutan. Menurut Syafrizal (2008) salah satu faktor yang dapat mengakibatkan adanya

kesenjangan antar daerah ialah adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Menurut Brulhart & Sbergami (2010) konsentrasi kegiatan spasial kegiatan ekonomi tersebut disebut sebagai aglomerasi. Kegiatan ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB di Provinsi Banten berdasarkan lapangan usahanya adalah kelompok industri pengolahan (manufaktur). Pada tahun 2019 kelompok industri mempunyai kontribusi 30,59% terhadap PDRB Banten (Gambar 1.3). Pada saat ini kelompok usaha industri di Provinsi Banten terpusat di tiga wilayah yaitu dengan pendapatan per kapita tertinggi yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kab. Tangerang (Damayanti, 2017).



Gambar 1.3 Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2019

Sumber: BPS (2020b)

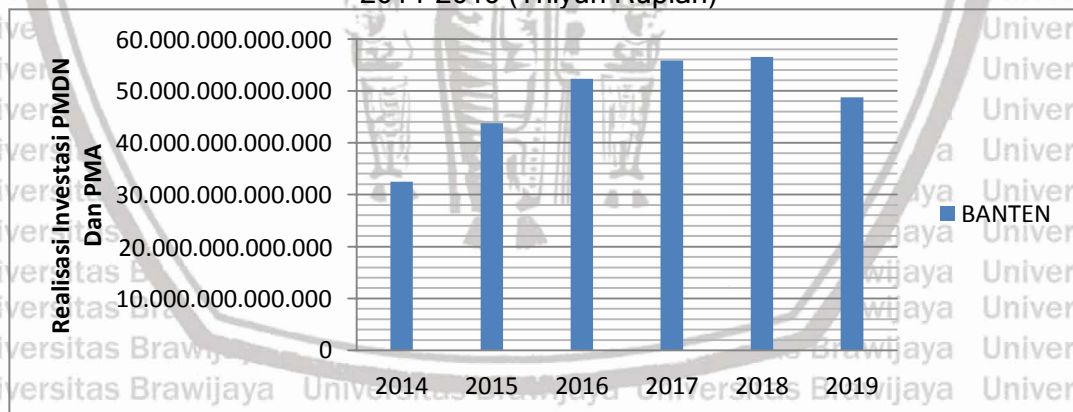
Selain faktor konsentrasi spasial kegiatan ekonomi atau aglomerasi, factor lainnya yang dapat memberikan pengaruh adanya kesenjangan antar daerah ialah urbanisasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat urbanisasi mempunyai hubungan yang kuat dengan pendapatan per kapita PDRB (Henderson, 2003). Urbanisasi akan berkontribusi pada pertumbuhan

berkelanjutan pada daerah perkotaan jika peningkatan produktivitas dikelola dengan baik sehingga memungkinkan inovasi dan implementasi ide-ide baru (Nguyen and Nguyen, 2018).

Faktor lainnya yang dapat berpengaruh pada ketimpangan ialah investasi.

Berdasarkan model pertumbuhan Solow, stok modal ialah salah satu aspek yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2014). Aktivitas penanaman modal mendatangkan investasi yang selalu akan memberikan penambahan ketersediaan modal dan kemudian bertambahnya ketersediaan modal akan menambah produktivitas dan kapasitas dan mutu produksinya, yang nantinya bias memicu pertumbuhan ekonomi (Sulistiawati, 2012). Adapun perkembangan nilai investasi bisa dilihat dalam jumlah PMDN di tambah PMA dengan demikian nilai investasinya yang ada di Provinsi Banten maka sangat dimungkinkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Banten.

Gambar 1.4 Perkembangan Nilai Investasi (PMDN+PMA) Provinsi Banten Tahun 2014-2019 (Trilyun Rupiah)



Sumber: BKPM, 2020

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2019 perkembangan nilai investasi yang ada di Provinsi Banten tiap tahun menunjukkan kenaikan, dimana perkembangan nilai investasi PMA dan PMDN tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 56,52 Trilyun Rupiah.

Berdasarkan uraian tentang data dan hubungan antar variabel diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan studi tentang **“Analisis Pengaruh Aglomerasi, Urbanisasi, dan Investasi terhadap Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada pernyataan latar belakangnya, perumusan masalah penelitian ini yaitu;

- 1) Apakah Aglomerasi tenagakerja mempengaruhi ketimpangan antar ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Banten?
- 2) Apakah urbanisasi mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar kabupaten atau kota di Provinsi Banten?
- 3) Apakah investasi mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar kabupaten atau kota di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisa pengaruhnya Aglomerasi tenagakerja pada ketimpangan ekonomi antar kabupaten atau kota di Provinsi Banten
- 2) Menganalisis urbanisasi pada ketimpangan ekonomi antar kabupaten atau kota di Provinsi Banten?
- 3) Menganalisa pengaruhnya investasi pada ketimpangan ekonomi antar kabupaten atau kota di Provinsi Banten?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Sukirno, 2004), sehingga untuk mengetahui suatu tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dari pendapatan nasional suatu wilayah yang di lihat dan diolah berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Perubahan dalam nilai pendapatan nasional di sebabkan karna suatu perubahan nilai dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda intensitasnya akan menyebabkan disparitas ekonomi atau ketimpangan pada daerah. Myrdal (1968) dan Friedman (1976) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan divergensi tiap daerah.

Menurut Sukirno (2004) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam atau Kekayaan alam meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil laut yang dapat diperoleh. Jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang didapat, kekayaan alam dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian, terutama pada masa masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

b. Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pengembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan memungkinkan untuk menambah produksi, disamping itu sebagai akibat pendidikan latihan dan pengalaman kerja ketrampilan penduduk akan bertambah tinggi, hal ini mampu meningkatkan produktifitas dan selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat dari pada pertambahan tenaga kerja. Selain dari pertambahan penduduk menyebabkan perluasan pasar. Sementara, akibat buruk dari pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kependudukan.

c. Investasi dan Tingkat Teknologi

Investasi sangat penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Di masyarakat yang kurang maju sekalipun barang – barang modal sangat besar peranya dalam kegiatan ekonomi, begitu juga dengan kemampuan teknologi, kemampuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Efek yang pertama (i) Kemajuan teknologi dapat mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksi suatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi. (ii) Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya, kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat. (iii) Kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang – barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harga.

d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Kondisi system sosial dan sikap masyarakat turut menentukan proses pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh di wilayah dengan adat istiadat tradisional yang tinggi dan menolak modernisasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, juga dimana wilayah yang sebagian besar tanahnya dimiliki oleh tuan – tuan tanah atau dimana luas tanah yang dimiliki adalah sangat kecil dan tidak ekonomis, pembangunan ekonomi tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan. Sikap masyarakat juga dapat menentukan pertumbuhan ekonomi, misalnya sikap masyarakat yang pekerja keras, pantang menyerah berhemat dengan tujuan investasi dan sebagainya dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Ketimpangan Ekonomi

a. Teori Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan disetiap wilayah adalah hal yang biasa dialami didalam aktivitas ekonomi sebuah daerah. Hal itu akibat dari terdapatnya ketidaksamaan muatan SDA serta ketidaksamaan keadaan demografi yang ada di tiap-tiap wilayah. Ketidaksamaan itu menimbulkan kekuatan sebuah wilayah untuk menunjang tahap pembangunan yang terlihat tidak sama. Sehingga di masing-masing wilayah umumnya ada daerah yang maju (*Developed Region*) serta daerah yang tertinggal (*Underdeveloped Region*) (Syafrizal, 2008).

Kuncoro (2006) menyatakan ketimpangan berdasarkan pada patokan hidup yang standar pada semua masyarakat, sebab perbedaan di tiap daerah adalah terdapat aspek anugerah awal. Ketidaksamaan itu bias mengakibatkan level pembangunan di sejumlah daerah menjadi tidak

sama, oleh karenanya menciptakan jarak kemakmuran di sejumlah daerah itu (Sukirno, 2010).

Ketimpangan di setiap daerah terlahir dari Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Di teori itu muncul suatu perkiraan hubungan dari level pembangunan ekonomi nasional sebuah negara dengan ketimpangan pembangunan di tiap daerahnya.

Hipotesa itu lalu populer menjadi Hipotesa Neo-Klasik (Syafriзал, 2008).

Berdasarkan Hipotesa Neo-Klasik, ketikapermulaan tahap pembangunan sebuah negara, ketimpangan pembangunan dari tiap daerah terlihat terjadi kenaikan. Tahap itu selalu berjalan sampai ketimpangan di titik atas. Lalu jika tahap pembangunan berjalan seterusnya artinya dengan bertahap ketimpangan pembangunan tiap daerahnya bias terjadi pelemahan. Dari hipotesa tersebut, ketimpangan pembangunan tiap daerah biasanya sangat tinggi dalam negara berkembang, serta sebaliknya akan dialami oleh negara maju. sehingga, kurva ketimpangan pembangunan tiap daerahnya garisnya huruf U terbalik.

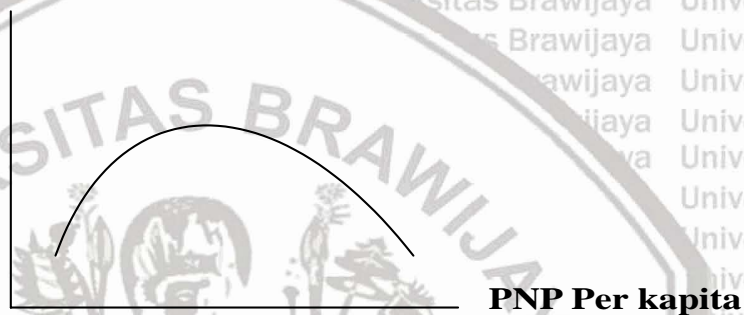
Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik diuji Williamson (1966) lewat studi tentang ketimpangan pembangunan tiap daerah untuk negara maju serta negara berkembang memakai data *time series* serta *cross section*.

Hasil dari Hipotesa Neo-Klasik terbukti betul secara empirik. Itu artinya jika tahap pembangunan sebuah negara secara tidak langsung bias mengecilkan jenjang ketimpangan pembangunan tiap daerah, namun di tahap awal malah hal sebaliknya yang terjadi (Syafriзал, 2008)

Kuznet (1955) menyatakan jika dalam langkah permulaan pertumbuhan ekonomi, penyaluran penghasilan menjadi buruk, tetapi

dalam langkah berikutnya, penyaluran penghasilannya bias terjadi kenaikan. Pengamatan tersebut lalu populer menjadi kurva Kuznet "U-Terbalik", sebab peralihan *longitudinal* (*time-series*) di penyaluran penghasilan. Kurva Kuznet bias didapatkan melalui tahap pertumbuhan berkelanjutan yang asalnya dari pengembangan bidang modern.

Koefisien Gini



Gambar 2.1 Kurva Kuznets

Sumber: Todaro & Smith (2014)

Hipotesis itu awalnya dari pertumbuhan ekonomi yang diawal naik dalam jenjang kemakmuran penghasilan sedikit hingga dalam sebuah jenjang pertumbuhan khusus lalu terjadi pelemahan. Kuznet menyatakan jika dari semua aspek sosial, ekonomi serta politik yang berpengaruh pada pola U, ada aspek vital yakni terfokusnya modal dalam golongan berpenghasilan besar, serta terdapat pergeseran penduduk dalam bidang pertanian tradisional kebidang industri modern. Williamson menganalisa korelasi dari penyaluran penghasilan serta pertumbuhan ekonomi di jenjang region sebuah negara.

Adanya ketimpangan tiap wilayah juga dipaparkan Myrdal (1957) Myrdal menciptakan teori keterbelakangan serta pembangunan ekonominya disekeliling gagasan ketimpangan regional di tingkat nasional serta internasional. Dalam menguraikan penggunaan *spread effect* serta *backwash effect* menjadi dapat menjalarnya dari inti pertumbuhan ke wilayah disekelilingnya.

Spread effect (dampak sebar) dimaksud menjadi sebuah dampak yang menciptakan keuntungan (*favourable effect*), meliputi jalur aktivitas investasi di inti pertumbuhan ke wilayah disekelilingnya. *Backwash effect* (dampak balik) dimaksud menjadi dampak yang menimbulkan kerugian (*infavourable effect*), meliputi jalur manusia dari daerah sekelilingnya maupun pinggiran khususnya akses modal kedaerah pusat serta membuat menurunnya modal pembangunan untuk daerah pinggiran yang sesungguhnya dibutuhkan supaya bias mengimbangi perkembangan daerah pusat.

Myrdal (1957) menyatakan adanya ketimpangan regional disebabkan tingginya dampak *backwash effect* daripada melalui *spread effect* di negara tertinggal. Peralihan modal bias menaikkan ketimpangan regional, naiknya permintaan kedaerah maju bias menstimulus investasi yang sesuai urutannya bias menaikkan penghasilan yang membuat putaran kedua investasi serta seterusnya. Ruang lingkup investasi yang makin baik disektor pengembangan bias membuat modal menjadi langka di daerah tertinggal (Jhingan, 2010)

b. Pengukuran Ketimpangan

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan yaitu angka indeks yang dikembangkan oleh (Williamson,

1965) sehingga dikenal dengan indeks williamsons (IW) dimana rumusnya sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 F_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

F_i = Jumlah penduduk kabupaten/kotai

N = Jumlah Penduduk Provinsi

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota ke- i

Y = PDRB per kapita rata-rata

Tingginya Indeks Williamson itu memiliki nilai positif serta berada dalam rentang nilai 0 hingga 1. Bila ketimpangan Williamson hampir 0 artinya ketimpangan regional tiap daerah di provinsi adalah rendah yakni makin merata level pemerataan penghasilan di tiap daerahnya. Bila ketimpangan Williamson hampir 1 artinya ketimpangan regional daerah di provinsi besarnya semakin tinggi level ketimpangan penghasilan di tiap daerahnya.

Oshima menentukan kategori dalam melihat kadarketimpangan penghasilan di tiap wilayah, apakah terdapat ketimpangan besar, sedang maupun kecil. Sehingga ditentukan kategori berikut ini.

- 1) Ketimpangan besar bila $IW > 0,5$
- 2) Ketimpangan sedang bila $IW = 0,35 - 0,5$
- 3) Ketimpangan kecil bila $IW < 0,35$

Menurut Syafrizal (2008) faktor pokok yang membuat ketimpangan tiap daerah adalah:

- 1) Perbedaan kandungan sumberdaya alam

Perbedaan SDA yang terkandung bias berpengaruh pada produksi tiap wilayah yang memiliki kandungan SDA sangat banyak bias menghasilkan suatu produk dengan biaya yang umumnya sangat murah daripada wilayah lainnya yang kandungan SDA-nya sedikit.

Situasi itu memicu pertumbuhan ekonomi wilayah yang terkait jadi makin cepat. Sementara itu daerah lainnya yang memiliki kandungan SDA lebih kecil cuma akan bisa memproduksi berbagai barang dengan biaya produksi lebih tinggi jadi kemampuan bersaingnya akan lemah.

2) Perbedaan Kondisi Demografis

Wilayah yang keadaan demografis bagus condong memiliki produktifitas tenaga kerja yang baik dan makin tinggi sehingga bias memacu investasi dan juga menaikkan tersedianya lapangan kerja.

3) Moblitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang serta palayanan tersebut sangatlah penting untuk aktivitas jual beli diantara wilayah jika perputarannya sedikit tersendat maka keunggulan produksi pada sebuah wilayah tidak bias dijual pada wilayah yang memerlukan ini akan menyebabkan ketimpangan pembangunan tiap daerah nantinya cukup besar karena susah untuk memacu pertumbuhan wilayah tersebut.

4) Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang sangat besar dan lebih cepat untuk suatu daerah bias mendorong proses pembangunan daerah tersebut dan jelas bias mempengaruhi

disparitas antar wilayah karena konsentrasinya pada wilayah tertentu yang kegiatan ekonominya besar. Tambunan (2001) menyebutkan lebih banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah:

- 1) Fokus aktivitas ekonomi wilayah. Konsentrasi aktivitas ekonomi daerah
- 2) Merupakan aktivitas ekonomi daerah sekedar terfokus dalam sebuah wilayah. Termasuk dari aktivitas ekonomi yaitu aglomerasi industri.
- 3) Pembagian investasi merupakan penyaluran investasi baik dengan langsung bahkan tak langsung. Alokasi investasi agar bias memacu pertumbuhan ekonomi daerah sesuai teori pertumbuhan ekonomi Harrod- Domar.
- 4) Tingkat mobilitas factor produksi yang rendah antar daerah. Mobilitas factor produksi yaitu gerakannya unsure produksi baik berwujud tenaga kerja bahkan bahan baku. Berdasarkan teori A.Lewis, yang populer disebut *unlimited supply of labour*, bila peralihan unsur produksi tiap daerah tidak terdapat halangan, lalu penutupnya yaitu pembangunan ekonomi yang maksimal di tiap daerah serta semua wilayahnya semakin baik.
- 5) Perbedaan SDA. Dasar pemikiran klasik banyak menyatakan jika pembangunan ekonomi di daeah yang SDA nya melimpah akan lebih berkembang dan berdampak pada makmurnya masyarakat daripada daerah yang minim SDA.
- 6) Tidak samanya keadaan demografis. Keadaan itu mencakup total serta pertumbuhan penduduk, kadar padatnya penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, serta semangat kerja.

7) Halangan perdagangan. Terhalangnya jalur barang serta jasa berpengaruh pada pembangunan sebuah wilayah. Menurut segi permintaan, langkanya barang serta pelayanan konsumen berpengaruh pada permintaan pasar pada aktivitas ekonomi lokal. Dari segi penawaran, susahnya memperoleh barang modal, input perantara, bahan baku maupun material lain bias membuat aktivitas ekonomi di sebuah wilayah mati.

2.1.3 Aglomerasi

Brulhart & Sbergami (2010) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial kegiatan ekonomi. Artinya kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Sedangkan Montgomery dalam Kuncoro (2006) mengartikan aglomerasi menjadi pusat spasial dari aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan dalam rangka pencermatan karena lokasinya yang berdampingan. Hal ini dikumpulkan dengan kluster spasial dari perusahaan, pegawai, serta pelanggan. Perspektif klasik memercayai jika aglomerasi adalah sebuah wujud spasial serta dikumpulkan melalui teori pencermatan melalui konsep eksternalitas untuk mengestimasi besarnya skala ekonomis.

Menurut Williamson (1965) aglomerasi adalah faktor terpenting dalam tahap awal pengembangan. Ketika infrastruktur transportasi dan komunikasi langka dan jangkauan pasar modal terbatas, efeknya dapat ditingkatkan secara signifikan dengan memusatkan produksi di satu area; tetapi ketika infrastruktur ditingkatkan dan pasar diperluas, eksternalitas kemacetan dapat mendukung area geografis ekonomi yang lebih tersebar.

Menurut Syafrizal (2008) aglomerasi mempunyai manfaat yang tidak bias didapatkan dari sebuah industry bila kedudukan industry tersebar. Manfaat itu antara lain:

- 1) Penghematan Skala (*scala economies*), yakni terdapat pencermatan di dalam produksi dari internal jika jumlah produksinya dinaikkan. Oleh karenanya bias member keuntungan dalam pemusatan penduduk dalam skala tinggi dibanding skala penduduk yang sedikit, industry serta aktivitas lainnya.
- 2) Penghematan lokasi (*lokalization economies*), yakni kemampuan yang dikumpulkan secara efektif yang dinikmati seluruh perusahaan untuk sebuah industri yang setipe dalam lokasi tertentu.
- 3) Penghematan urbanisasi (*urbanization economies*), yakni wujud efisiensi yang dikumpulkan dengan kenaikan jumlah total (penduduk, hasil industri, penghasilan serta kesejahteraan) di sebuah tempat untuk seluruh aktivitas yang dijalankan secara bersamaan

2.1.4 Urbanisasi

Menurut McGranahan & Satterthwaite (2014) urbanisasi mengacu pada meningkatnya jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan. Urbanisasi terutama merupakan hasil dari migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perluasan batas-batas kota dan pembentukan pusat-pusat kota baru (kebanyakan reklasifikasi dari apa yang sebelumnya desa sebagai mereka tumbuh atau berkembang untuk memenuhi kriteria perkotaan nasional) juga berkontribusi terhadap urbanisasi. Menurut Aziz et al.(2012) urbanisasi adalah proses yang mengarah pada pertumbuhan kota-kota karena industrialisasi dan pembangunan ekonomi, dan yang mengarah pada perubahan spesifik perkotaan dalam spesialisasi, pembagian kerja dan perilaku manusia

Menurut Tjiptoherijanto (1999) terdapat faktor pendorong terjadinya urbanisasi yang dikenal dengan istilah *urbanization economies* yaitu aspek-aspek yang bias memotivasi aktivitas usaha agar bertempat di kota besar sebagai pemusatan penduduk serta prasarna publik, yakni menjadi peluang konsumen

serta sumber pekerjanya, prasarana produksi yang menungknkan operasi kegiatan usaha ekonomi dengan makin efisien. Aspek-aspek itu biasanya tidak disemua di kota kecil khususnya pedesaan (*rural*)

2.1.5 Investasi

Definisi investasi pada ekonomi perusahaan merupakan penyaluran dana dengan tujuan bias menjaga, meningkatkan nilai, maupun member umpan balik positif (Sutha, 2000). Sedangkan definisi investasi dalam ekonomi pembangunan adalah penambahan modal yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi reginal dan pendapatan perkapita (Hayami, 2001). Modal yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk modal fisik (seperti mesin, bahan baku, atau barang lainnya) tetapi juga dapat dalam bentuk tidak berwujud (seperti peningkatan kapasitas dan pengetahuan sumberdaya manusia melalui investasi pendidikan, pelatihan kesehatan, penelitian, dan lainnya).

Investasi adalah factor pembentuk modal yang sangat penting dalam menentukan pembentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi sangatlah penting dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi dalam periode waktu lama maupun masa mendatang karena nantinya produksi barang dan jasa akan meningkat sesuai dengan investasi yang di gunakan, juga akan menyerap banyak tenaga kerja yang efeknya akan pada pemeretaan pendapatan per kapita pada wilayah yang di tanami investasi (Sukirno, 2010).

Menurut (Mankiw, 2014) terdapat tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu:

- 1) Penanaman modal merupakan bisnis yaitu barang investasi yang di beli perusahaan agar digunakan untuk produksi yang akan datang.
- 2) Penanaman modal residensial (*Residential investment*) yaitu investasi yang bergantung pada harga pasar atas modal.

3) Investasi persediaan (*Inventory Investment*) adalah investasi dalam persediaan barang untuk meratakan tingkat produksi sepanjang waktu, investasi persediaan agar perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien, dan menghindari kehabisan persediaan barang ketika barang penjualan tiba-tiba melonjak

Menurut sumbernya, investasi pada suatu wilayah dapat bersumber dari modal dalam negeri dinamakan PMDN serta modal dari luar negeri dinamakan PMA. Semuanya juga pokok serta memiliki pengaruh pada perkembangan ekonomi suatu bangsa Dumairy (1996). Bukan sekedar pihak swasta yang berusaha melaksanakan investasi namun pemerintah pun ikut terjun di dalamnya. Contohnya pemerintah membenahi prasarana serta menambah aset. Pendanaan pembangunan daerah untuk prasarana tersebut umumnya dinamakan pembelanjaan modal. Belanja modal adalah pemakaian uang yang berhubungan dengan aktivitas penanaman modal yang dijalankan pemerintah dalam menggapai target pembangunan. Belanja modal bias mendapatkan tersedianya fasilitas serta infrastruktur yang dipelukan dalam menaikkan perkembangan ekonomi (Rizky, Agustin and Mukhlis, 2016)

2.1.6 Keterkaitan Aglomerasi dengan Ketimpangan Antar Wilayah

Konsentrasi perusahaan atau industri yang dipengaruhi oleh kondisi geografis memiliki hubungan dengan pertumbuhan regional dan tenaga kerja. Kawasan industri dapat mempengaruhi penyebaran informasi, inovasi, dan teknologi. Hal ini juga dapat mempengaruhi tenaga kerja dan memberikan pelatihan khusus untuk masyarakat dan mendorong biaya produksi yang lebih efisien karena produksi bersama (Trullen, 2015). Menurut Nakamura (2008) konsentrasi populasi dan industri akan meningkatkan produktivitas regional.

Pemusatan aktivitas ekonomi tiap wilayah yang besar bias memicu bertambahnya ketimpangan pembangunan tiap daerah sebab tahap pembangunan daerah yang pesat bias terjadi di wilayah yang pemusatan aktivitas ekonomi yang besar (Syafrizal, 2008). Geppert & Stephan (2008) menjelaskan bahwa peningkatan aglomerasi ekonomi dapat memicu peningkatan disparitas atau ketimpangan antar wilayah di Inggris dan pada periode 1991-1995 aglomerasi berhubungan negative terhadap ketimpangan di *European Union*. Dalam hasil penelitian Damayanti (2017) yang menunjukkan hasil bahwa aglomerasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan antar wilayah.

2.1.7 Keterkaitan Urbanisasi dengan Ketimpangan Antar Wilayah

Menurut Nguyen & Nguyen (2018) kemakmuran dan pertumbuhannya sebuah kota sangat bergantung pada kemampuan untuk menarik pekerja ke sektor manufaktur, untuk mengalokasikan pekerjaan yang sesuai untuk pekerja, dan untuk terus mengembangkan keterampilan mereka. Urbanisasi menyebabkan migrasi orang-orang yang terampil dan bakat ke perkotaan. Konsentrasi tersebut menyebabkan interaksi dan limpahan pengetahuan dan keterampilan pekerja di perkotaan sehingga mendorong produktivitas pekerja yang pada ahirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Nakamura (2008) menyimpulkan bahwa menggandakan populasi perkotaan akan menyebabkan peningkatan 3,4 persen dalam produktivitas di Jepang.

Pada sisi lain, (Henderson, 2003) mengemukakan bahwa dengan adanya pemusatan atau konsentrai sumberdaya manusia pada kota-kota besar maka kota kecil dan daerah pedesaan kekurangan sumber daya manusia sehingga terjadi kerugian ekonomi (*diseconomic*). Dengan menyandingkan pendapat Nguyen & Nguyen (2018) dan (Henderson, 2003) maka dapat dirangkum bahwa

urbanisasi dapat mempunyai dampak pertumbuhan yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan sehingga menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Hal tersebut didukung hasil penelitian (Saputra and Rahayu, 2015) yang memberi kesimpulan jika urbanisasi memiliki pengaruh positif pada ketimpangan.

2.1.8 Keterkaitan Investasi dengan Ketimpangan Antar Wilayah

Investasi merupakan salah satu komponen penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Mankiw, 2014). Semakin tinggi tingkat investasi suatu daerah dan komponen lain dianggap tetap (*ceteris paribus*) maka semakin tinggi PDRB-nya. Dalam model pertumbuhan neoklasik tradisional, peningkatan modal menyebabkan pertumbuhan hanya karena modal merupakan faktor produksi. Teori Harrod-Domar yang mengemukakan jika investasi sangat memiliki pengaruh pada perkembangan ekonomi untuk waktu periode panjang yang dengan langsung ataupun tak langsung. Investasi nantinya bisa mempengaruhi ketimpangan. Tingkat investasi mempunyai hubungan positif pada laju pertumbuhan ekonomi, jika suatu wilayah kurang investasi dibandingkan wilayah lain maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi serta penghasilan perkapita di daerah itu juga ikut menurun sebab menjadi kurang produktif.

Tiap-tiap Pemda memiliki kekuatan yang tidak sama untuk membuat anggaran atau alokasi belanja modal untuk daerahnya disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Demikian juga daya tarik wilayah terhadap investor juga berbeda-beda sehingga jumlah penanaman modal swasta untuk tiap daerah juga berbeda. Wilayah yang memiliki daya tarik yang bagus kemudian bias mendatangkan investor yang banyak untuk melakukan penanaman modal di wilayah tersebut. Dengan konsentrasi investasi di sebuah daerah, lalu ketimpangan distribusi investasi itu diasumsikan menjadi aspek pokok yang menimbulkan adanya ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian

Dhyatmika & Atmanti (2013) membuktikan adanya pengaruh signifikan investasi (PMA) terhadap ketimpangan di Provinsi Banten dan hasil penelitian Danawati et al.(2016) membuktikan adanya pengaruh signifikan investasi terhadap ketimpangan di Provinsi Bali.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu sudah banyak yang melakukan penelitian tentang ketimpangan dan variabel yang mempengaruhinya. Berbagai penelitian yang sudah dilakukan dan menjadi rujukan penelitian ini yaitu

Damayanti (2017) melaksanakan penelitian yang berjudul *Analisis Dampak Aglomerasi terhadap Ketimpangan Regional Pulau Jawa*. Penelitiannya memakai data sekunder dari 6 Provinsi yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY dan Jateng periode tahun 2009-2013. Data dianalisis menggunakan Regresi Panel. Mengacu dari hasil perkiraan Regresi Data Panel, memperlihatkan jika adanya pengaruh variable aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan regional yang ada di Pulau Jawa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel aglomerasi sebagai prediktor terhadap ketimpangan antar wilayah dan menggunakan regresi data panel sebagai alat analisis. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel pertumbuhan, tetapi menggunakan variabel urbanisasi dan investasi sebagai variabel lain yang diduga menjadi prediktor variabel ketimpangan. Perbedaan lainnya adalah penelitian sebelumnya menghitung ketimpangan antar provinsi sedangkan dalam penelitiannya ini menghitung ketimpangan antar kabupaten ataupun kota di Provinsi Banten

Penelitian Yeniwati (2013) berjudul *Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera*. Data skunder berasal dari 10 provinsi yang ada di Sumatera

periode 2005-2010. Variabel bebas yang digunakan adalah aglomerasi, investasi dan sumberdaya alam. Data dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil estimasi memperkirakan aglomerasi dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan pada ketimpangan ekonomi di daerah Sumatera. Sedangkan variabel SDA mempengaruhi negative signifikan pada ketimpangan ekonomi di daerah Sumatera. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dengan variabel aglomerasi dan investasi sebagai prediktor terhadap ketimpangan antar wilayah dan menggunakan regresi data panel sebagai alat analisis. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel sumberdaya alam, tetapi menggunakan variabel urbanisasi variabel lain yang diduga menjadi prediktor variabel ketimpangan. Perbedaan lainnya adalah penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian.

Penelitian Saputra & Rahayu (2015) berjudul *Hubungan Tingkat Urbanisasi dan Tingkat Ketimpangan Wilayah di Daerah Pantura Jawa Tengah*.

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan pola antara indikator ketimpangan dengan indikator urbanisasi. Hasil analisis menunjukkan tingkat urbanisasi berbanding lurus terhadap ketimpangan. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu variabel yang dipakai yakni ketimpangan dengan urbanisasi. Perbedaannya ada pada teknik analisa yang dipakai yang mana penelitian sebelumnya memakai teknik deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan teknik uji hipotesis atau inferensial dengan regresi data panel.

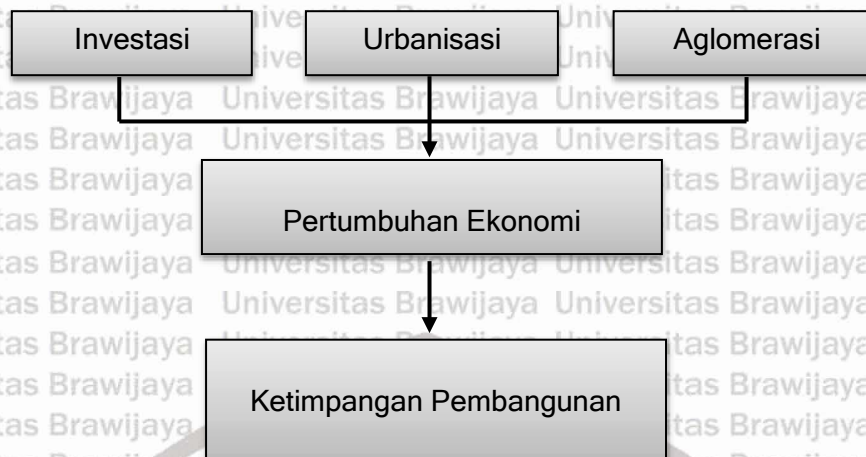
Rangkuman penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan tersebut bias dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
Damayanti, 2017	Analisis Dampak Aglomerasi terhadap Ketimpangan Regional Pulau Jawa	Perumbuhan ekonomi, Aglomerasi, Ketimpangan	Regresi data panel	Adanya pengaruh signifikan variabel aglomerasi dan pertumbuhan pada penurunan ketimpangan regional yang terjadi di Pulau Jawa
Yeniwati, 2013	Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera	Investasi, Aglomerasi, Sumberdaya alam, Ketimpangan	Regresi data panel	Investasi dan sumberdaya alam mempengaruhi negative pada ketimpangan dan aglomerasi mempengaruhi positif pada ketimpangan
Utari et al., 2017	Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa	Tenaga kerja, Investasi, Ketimpangan	Regresi data panel	Tenaga dan investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan
Saputra & Rahayu, 2015	Hubungan Tingkat Urbanisasi dan Tingkat Ketimpangan Wilayah di Daerah Pantura Jawa Tengah	Urbanisasi Ketimpangan	Deskriptif	Tingkat urbanisasi berbanding lurus terhadap ketimpangan
Dhyatmika & Atmanti, 2013	Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran	Investasi (PMA), Pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran	Data panel	Investasi PMA memberikan pengaruh positif dan signifikan pada ketimpangan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negative signifikan pada ketimpangan dan tingkat pengangguran memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan
Sharimakin et al., 2015	Education, Labour Productivity And Income Inequality In Nigeria	pendidikan produktivitas saving pendapatan redistribusi	Time series	Tingkat pendidikan memiliki dampak negative terhadap ketimpangan bahwa dengan pendidikan yang lebih baik tidak berdampak pada ketimpangan, produktivitas memiliki dampak negatif, pendapatan redistribusi juga memiliki dampak negative pada ketimpangan. Saat lebih banyak sumber daya dipindahkan ke sektor swasta

				hanya <i>saving</i> memiliki dampak positif yaitu peningkatan tabungan sector swasta dapat mengurangi dampakketimpangan di Nigeria
Yeniwati, 2013	Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera	Investasi Sumberdaya Alam Pertumbuhan ekonomi	Data panel	Berdasarkan hasil analisa data dan uji hipotesisnya menyimpulkan jika adanya pengaruh signifikan antara investasi dengan ketimpangan ekonomi di daerah Sumatera. Pengaruh investasi pada ketimpangan ekonomi di daerah Sumatera sepanjang tahun 2005-2010 ialah negative dengan nilai R^2 yaitu -0.085. Jika jumlah investasinya bertambah 1%, maka akan mengurangi ketimpangan 0.085%. Hal tersebut mengindikasikan jika makin besar jumlah investasi di daerah Sumatera maka akan menurunkan ketimpangan ekonomi di daerah Sumatera dengan asumsi <i>ceteris paribus</i> .
Adipuryanti & Sudibia, 2015	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Bali	Investasi Pertumbuhan ekonomi Jumlah penduduk	Analisis jalur	Mendesripsikan jika variable jumlah penduduk yang bekerja dan investasi memberikan pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Variabel pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja dan investasi tidak memberikan pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan.

2.3 Kerangka Hipotesis



Gambar 2.2 Kerangka Hipotesis

2.4 Hipotesis Penelitian

Bedasarkan kajian teori serta penelitian yang sudah dilaksanakan maka hipotesisnya yakni;

- 1) Diperkirakan variabel Aglomerasi menimbulkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Banten.
- 2) Diperkirakan variabel Urbanisasi menimbulkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan kabupaten atau kota di Provinsi Banten.
- 3) Diperkirakan variabel Investasi menimbulkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan kabupaten atau kota di Provinsi Banten.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibuat agar penelitiannya fokus pada masalah yang diangkat sehingga pembahasan relevan dengan tujuannya penelitian yang sudah ditetapkan serta relevan dengan manfaat penelitian yang diharapkan.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang pembangunan ekonomi regional dengan memfokuskan pada variabel ketimpangan antar wilayah, aglomerasi, investasi, dan urbanisasi

Populasi penelitian ini adalah semua wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Banten yang mencakup: Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini tidak ada sampel karena menggunakan teknik sensus atau semua anggota populasi dijadikan sampel.

Periode waktu data yang dianalisis terbatas untuk Tahun 2014 – 2019.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada pendekatan metodologinya, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Saunders et al.(2016), penelitian kuantitatif ialah penelitian dengan menggunakan data berupa angka (*numeric*)

untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan pada tujuan penelitian, peneliti ini adalah penelitian asosiatif. Berdasarkan pada tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian *explanatory* yakni model penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bukti tentang adanya hubungan sebab akibat (*causal*) satu variabel terhadap variabel lainnya dimana penelitiannya ini bertujuan mengetahui pengaruhnya variabel aglomerasi,

investasi, dan urbanisasi terhadap ketimpangan antar wilayah. Berdasarkan pada horison waktu pengumpulan datanya penelitian merupakan penelitian panel yaitu penelitian dengan menggunakan data dari beberapa objek (dalam hal ini wilayah) yang sama dimana dalam masing-masing objek diambil beberapa periode waktu tertentu

3.3 Variabel Penelitian

Variabel adalah atribut dari sebuah fenomena, tindakan, ciri, sifat ataupun simbol yang bisa diukur dan yang diberi nilai (Cooper and Schindler, 2013).

Penelitian ini memakai empat variabel yang bisa dikelompokkan menjadi variabel bebas dan terikat.

- 1) Variabel terikat ialah variabel yang perubahannya dikarenakan pengaruh dari variabel lain atau variabel yang berubah sebagai respon dari variabel lainnya. Adapun yang menjadi variabel terikatnya ialah ketimpangan regional
- 2) Variabel bebas ialah variabel yang perubahannya memberikan pengaruh variabel lainnya (variabel *dependent*). Dalam penelitiannya ini terdapat tiga variabel bebas yaitu: Aglomerasi, Urbanisasi, dan investasi

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pendapat dari Indriantoro & Supomo (2014), pengertian dari definisi operasional variabel adalah teknik yang dipakai peneliti dalam mengoperasikan variabel dengan begitu menjadi variabel yang dapat diukur dan memberikan kesempatan untuk peneliti lainnya untuk mereplikasi pengukuran yang sejenis ataupun mengembangkan cara pengukuran variabel yang semakin baik Berikut definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian ini:

- 1) Ketimpangan regional adalah kesenjangan ekonomi antar wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson (IW) yang nilainya diantara 0 sampai dengan 1. Adapun rumus IW sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 F_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

F_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

N = Jumlah Penduduk Provinsi

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota ke i

Y = PDRB per kapita rata-rata

- 2) Aglomerasi yang dimaksud ialah pemusatan industri dalam kabupaten/kota di Provinsi Banten. Aglomerasi diukur dengan Indeks Basalla yang diadopsi dari Brulhart & Sbergami (2010) dengan rumus berikut:

$$IB = \frac{E_{ij}}{\sum_j E_{ij}} \bigg/ \frac{\sum_i E_{ij}}{\sum_i \sum_j E_{ij}}$$

Keterangan:

IB = indeks Basalla

E_{ij} =keseluruhan karyawan di sector industri level kabupaten atau kota

$\sum_j E_{ij}$ = keseluruhan karyawan di level kabupaten atau kota

$\sum_i E_{ij}$ = keseluruhan karyawan di sector industri level provinsi

$\sum_i \sum_j E_{ij}$ = keseluruhan karyawan di level provinsi

- 3) Urbanisasi dalam hal ini ialah peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan pada semua Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Tingkat urbanisasi diukur dengan rumus yang diadopsi dari Bloom et al.(2010) berikut:

$$URB_t = \frac{PU_t}{PU_t + PR_t}$$

Keterangan:

URB_t = tingkat urbanisasi pada tahun ke-t

PU_t = populasi penduduk di perkotaan pada tahun ke-t

PR_t = populasi penduduk di pedesaan pada tahun ke-t

t = 1,2, .. 9 (tahun 2014 - 2019)

- 4) Investasi dalam hal ini ialah nominal penanaman modal baik yang bersumber dari PMA maupun PMDN yang telah terelaisasi di setiap Kabupaten ataupun Kota di Provinsi Banten..

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber datanya ialah sumber sekunder yaitu lembaga yang telah menyediakan data dalam hal ini BPS baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan BKPM. Adapun data yang dikumpulkan diantaranya:

- 1) PDRB perkapita Provinsi Banten Tahun 2014-2019
- 2) PDRB perkapita Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten periode 2014-2019
- 3) Banyaknya penduduk setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten Periode 2014-2019
- 4) Banyaknya penduduk pedesaan dan perkotaan Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten periode 2014-2019
- 5) Data investasi yaitu jumlah PMA ditambah PMDN trilyun rupiah Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten periode 2014-2019

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Regresi Data Panel

Untuk keperluan mencapai tujuan penelitian atau menguji hipotesis, memakai analisa regresi linier dengan pendekatan data panel. Regresi data panel berbeda dengan regresi pada umumnya yang digunakan untuk data *time series* ataupun *cross section*. Regresi data panel memiliki dua subscip untuk tiap variabelnya yaitu dimensi *cross section* dan *time series*. Berikut persamaan regresi data panelnya

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + S_{it}$$

Keterangan

Y_{it} = Ketimpangan Pembangunan kabupaten atau kota ke i tahun ke t

X_1 = Aglomerasi kabupaten atau kota ke i tahun ke t

X_2 = Urbanisasi kabupaten atau kota ke i tahun ke t

X_3 = Investasi kabupaten atau kota ke i tahun ke t

α = konstanta atau Intersep

β = Koefisien regresi

ε = error

3.6.2 Model Estimasi Persamaan Regresi Data Panel Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menggunakan tiga model pendekatan yang ada pada regresi data panelnya yakni *PLS Model* ataupun *CE*, *FE*, dan *RE*.

Akan tetapi, untuk keperluan estimasi atau menguji hipotesis digunakan satu model terpilih. Berikut penjelasan masing-masing model dan cara menentukan model terpilih. Metode ini, yaitu:

a. Model Pooled

Merupakan model yang paling sederhana sebab cuma memvariasikan data *time series* dan *cross section*. Namun kelemahan dalam modelnya tersebut tidak mempertimbangkan dimensi waktu ataupun personal, serta dalam *intersep* maupun *slope* tidak berubah antar individu maupun waktu jadi bias dijelaskan jika tingkah laku data perusahaannya sama dengan berbagai periode. Hal ini kurang sesuai dengan tujuan digunakannya data panel sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat digunakan dua buah teknik dalam membuat model data panel, yakni *FE* dan *RE*. Metode *pooled* tersebut dapat memakai pendekatan OLS ataupun teknik kuadrat paling kecil untuk mengestimasi data model panel..

b. Model Efek Tetap

Pada model tersebut diasumsikan bahwa terdapat variabel yang tidak masuk dalam persamaan dan mungkin adanya *intercept* yang tidak bergantung dengan waktu. Jika disimpulkan ada korelasi yang tetap antara a_1 dan variabel bebas maka model itu dikatakan model FE ataupun dengan maksud lain nilai *intersep* untuk setiap X_1 tidak sama namun mempunyai *slope* yang sama. Perkiraan barometer model FE dapat memakai metode OLS yakni dengan memperbanyak variabel *dummy* yang sesuai untuk setiap nilai *variable* bebas.

c. Model Efek Acak

Pada model *random effect* tersebut perbedaan ciri seseorang dan waktu yang diakomodir menggunakan *error* dan model. Karena ada dua komponen yang memiliki peranan dalam pembentukan *error* (yakni seseorang dan waktu), jadi dalam model tersebut Model *random effect* diestimasi dengan menggunakan *generalized least square* (GLS) dan

dalam *Random Effect Model* perbedaan-perbedaan antar individu dan waktu diakomodasi lewat *error* dari model.

3.6.3 Uji Menentukan Model Panel

Guna menentukan model yang tepat untuk dijadikan dasar estimasi atau analisis, dilakukan uji berikut:

a. Uji Chow

dilaksanakan guna menetapkan pengujian yang manakah diantara kedua metode yang seharusnya dipakai dalam model data panel. Pengujiannya menggunakan hipotesis seperti di bawah ini;

$$H_0 = \text{Pooled Least Square}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Maka dalam *chow test* bila nilai signifikansinya $> \alpha$ 0,05 maka hipotesis H_0 diterima, kebalikannya bila nilai signifikansinya $< \alpha$ 0,05 maka hipotesis H_1 diterima.

b. Uji Hausman

dilaksanakan guna menetapkan pengujian manakah diantara kedua metodanya yang seharusnya dipakai dalam model data panel dalam penelitian ini. Pengujiannya menetapkan hipotesisnya seperti di bawah ini;

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Jika chi square hitung $>$ chi square tabel, maka H_0 dinyatakan ditolak dan model FE lebih tepat dipakai. Kebalikannya jika chi square hitung $<$ chi square table jadi H_1 dinyatakan ditolak dan model RE lebih tepat dipakai.

3.6.4 Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji statistic F dipakai untuk menguji apakah seluruh variable independen yang dimaksudkan dalam model mempengaruhi secara bersama pada variable dependennya. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini yakni;

H_0 : variabel Aglomerasi, urbanisasi, dan investasi secara bersama-sama tidak mempengaruhi ketimpangan

H_1 : variabel Aglomerasi, urbanisasi, dan investasi secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan

Ketentuan yang digunakan yakni:

1. Bila $F_{hitung} > F_{table}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel Aglomerasi, urbanisasi, dan investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan.
2. Bila $F_{hitung} < F_{table}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 di terima dan H_1 di tolak yang artinya bahwa variable variabel Aglomerasi, urbanisasi, dan investasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap ketimpangan.

b. Uji t

Uji t pada regresi linear berganda dipakai guna menguji pengaruhnya variable independen pada variable dependennya secara parsial.

Dalam penelitian ini, uji t ini sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian atau hipotesis penelitian ini. Adapun hipotesis yang diuji adalah

H_0 : variabel Aglomerasi, urbanisasi, dan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan

H_1 : variabel Aglomerasi, urbanisasi, dan investasi secara parsial berpengaruh terhadap ketimpangan

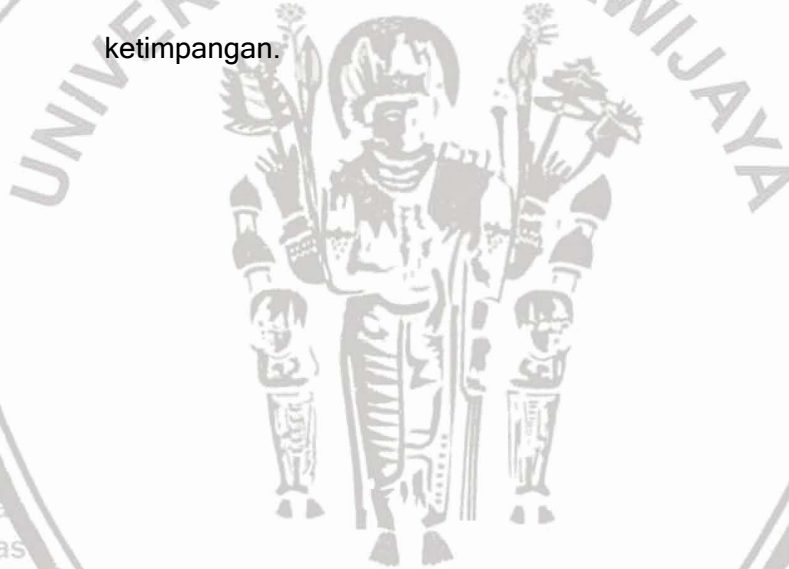
Ketentuan yang digunakan yakni:

1) Bila t hitung $>$ t table pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 di tolak dan H_1 diterima,

yang berarti bahwa variabel Aglomerasi, urbanisasi, dan investasi secara individual mempengaruhi ketimpangan.

2) Bila t hitung $<$ t table pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 di terima dan H_1 di

tolak yang artinya bahwa variabel-variabel Aglomerasi, urbanisasi, dan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan.

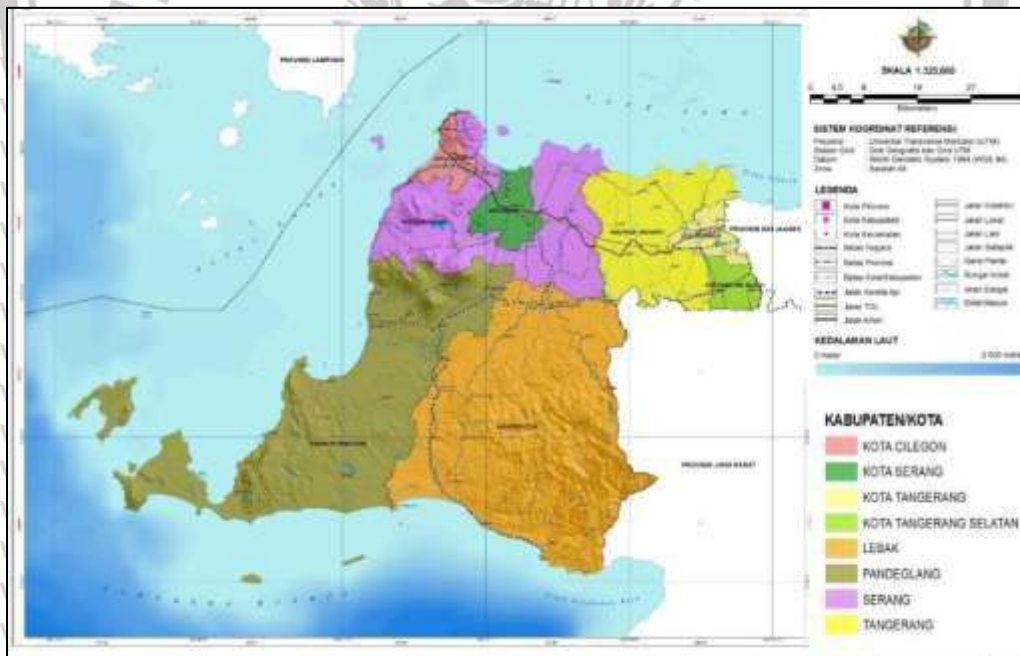


BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Provinsi Banten

Provinsi Banten berada di Ujung Barat Pulau Jawa dan tepat berbatasan dengan Ibu Kota Negara yakni DKI Jakarta. Provinsi ini sebagai pintu masuk yang mengoneksikan Pulau Jawa dengan Sumatera, dikarenakan sebagai titik bertemunya jalur lalu lintas yang strategis yakni jalur Lampung-Jakarta. Letak geografis ini menjadikan Banten perantara utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa dan menjadi tempat aglomerasi ekonomi dan perkampungan yang berpotensi.



Sumber: (BPS, 2020b)

Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Banten

Secara astronomis, Provinsi Banten terletak pada $05^{\circ}07'50''$ dan $07^{\circ}01'01''$ LS, serta $105^{\circ}01'11''$ dan $106^{\circ}07'12''$ BT.

Dari segi geografis nya, Batas wilayah Banten ialah:

- a. Batas bagian Utara ialah Laut Jawa
- b. Batas bagian Selatan ialah Samudera Hindia
- c. Batas bagian Barat ialah Selat Sunda
- d. Batas bagian Timur ialah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat

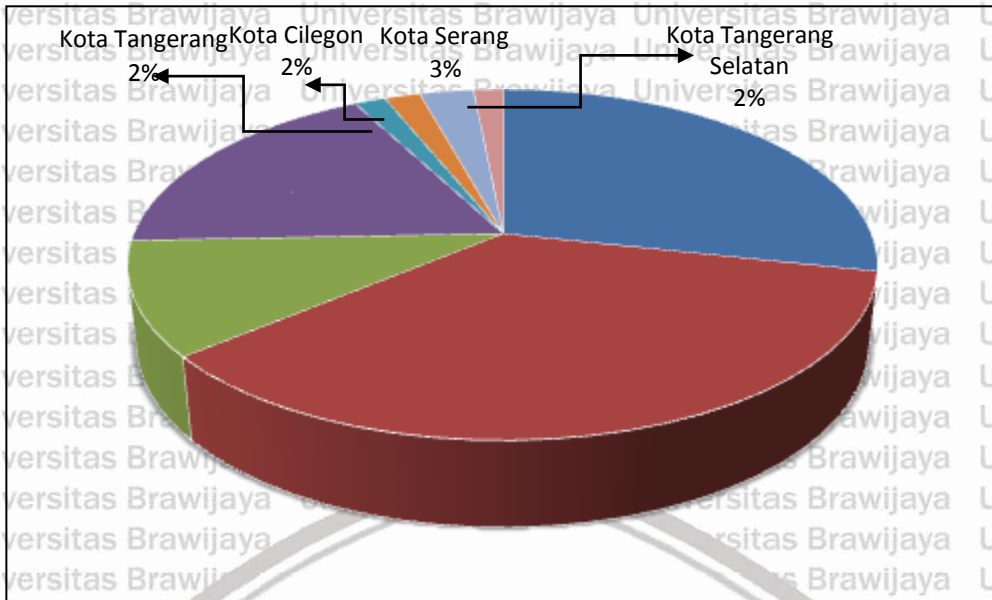
Pada mulanya, Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, tetapi berdasar UU No.23 tahun 2000 terkait Pembentukan Provinsi Banten tertanggal

17 Oktober 2000, Banten sebagai daerah provinsi otonom. Dari segi administratifnya, Banten terbagi dalam 8 wilayah yang meliputi 4 wilayah kabupaten (Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang) dan 4 wilayah kota (Tangerang, Cilegon, Serang, dan Tangerang Selatan) dengan 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa.

Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Kab. Pandeglang	2.747	35	326	13
Kab. Lebak	3.427	28	340	5
Kab. Tangerang	1.012	29	246	28
Kab. Serang	1.734	29	326	-
Kota Tangerang	154	13	-	104
Kota Cilegon	176	8	-	43
Kota Serang	267	6	-	66
Kota Tangerang Selatan	147	7	-	54
Provinsi Banten	9.663	155	1.238	313

Sumber: BPS (2019)



Sumber: BPS (2019)

Gambar 4.2 Presentase Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Provinsi Banten ini seluas 9.663 Km², dengan wilayah paling luas ialah kabupaten Lebak yakni 3.427 Km² atau senilai 35% dari luas Provinsi Banten. Selanjutnya urutan ke-2 ialah Kabupaten Pandeglang seluas 2.747 km² atau 28% dari luas Provinsi Banten. Sementara wilayah paling kecil ialah Kota Tangerang Selatan seluas 147 Km² atau senilai 2% dari luas Provinsi Banten. Kota Serang selaku ibu kota Provinsi Banten luasnya 267 Km² atau senilai 3% dari luas Provinsi Banten.

Topografi wilayah provinsi ini dengan ketinggiannya kira-kira 0 – 2.000 Mdpl. Keadaan topografi secara umum provinsi ini berupa dataran rendah yakni 0 – 200 Mdpl yang berada di hampir semua kabupaten atau kota. Sementara area Lebak Tengah dan bagian kecil Kabupaten Pandeglang ketinggiannya 501 – 2.000 Mdpl yang terletak di Puncak Gunung Sanggabuana dan Halimun.

Keadaan iklim di Provinsi ini mendapat pengaruh dari Angin Monson dan Gelombang La Nina (El Nino). Ketika musim penghujan, sekitar bulan November

hingga Maret, cuacanya mendapat pengaruh angin dari barat. Ketika musim kemarau pada bulan Juni hingga Agustus, hanya mendapat pengaruh angin dari Timur berakibat provinsi ini terjadi kekeringan, khususnya di sekitar pantai utara yang suhunya di area pantai dan perbukitan sekitar 22°C dan 32°C, sementara temperatur di pegunungan yang ketinggiannya sekitar 400 -1.350 mdpl ialah berkisar 18°C -29°C.

4.1.2 . Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Banten adalah salah satu provinsi termuda di Pulau Jawa mempunyai keberhasilan pembangunan ekonomi yang baik jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang didekati dengan laju pertumbuhan PDRB. Meskipun besaran pertumbuhannya berbeda antar Kab/Kota, tetapi terdapat dua daerah yang selalu mempunyai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi yakni Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Pandeglang	5.81	5.52	6	6.02	5.04
Kab. Lebak	6.2	5.57	5.76	5.8	5.77
Kab. Tangerang	5.6	5.41	5.82	5.93	5.88
Kab. Serang	5.09	5.09	5.22	5.33	5.08
Kota Tangerang	5.37	5.34	5.88	5.92	4.31
Kota Cilegon	4.75	5	5.5	5.97	5.65
Kota Serang	6.35	6.33	6.43	6.46	6.44
Kota Tangsel	7.25	6.74	7.3	7.37	7.35
Banten	5.61	5.51	5.93	6.07	5.54

Sumber: BPS (2020b)

Tabel 4.2 bisa dijadikan indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Banten jika ditinjau dari indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi pada sisi lain

indikator ketimpangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil penelitian Damayanti (2017) memperlihatkan jika taraf kesenjangan antar wilayah di Provinsi Banten ialah yang paling tinggi dari pada provinsi lain yang ada di Pulau Jawa.

Untuk melihat keadaan perekonomian di Banten berdasar PDRB, ialah jumlah dan nilai tambah yang didapatkan dari semua unit bisnis dari area tertentu ataupun jumlah dan nilai produk akhir yang didapatkan oleh semua unit ekonomi. Melalui PDRB memperlihatkan besarnya perekonomian wilayah tertentu dan keadaan wilayah bersangkutan berkaitan keadaan ekonomi tiap kabupaten atau kota di Provinsi Banten.

Tabel 4.3 PDRB Provinsi Banten ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2019 (juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Pandeglang	15,097	15,974	16,857	17,876	18,941	19,895
Kab. Lebak	15,756	16,733	17,716	18,788	19,767	20,908
Kab. Tangerang	73,828	77,963	82,139	86,937	92,124	97,539
Kab. Serang	42,301	44,455	46,720	49,154	51,774	54,404
Kota Tangerang	86,184	90,808	95,631	101,280	107,267	111,890
Kota Cilegon	57,262	59,983	63,014	66,534	70,409	74,385
Kota Serang	16,745	17,809	18,927	20,139	21,445	22,836
Kota Tangerang Selatan	42,412	45,486	48,603	52,214	55,936	60,044

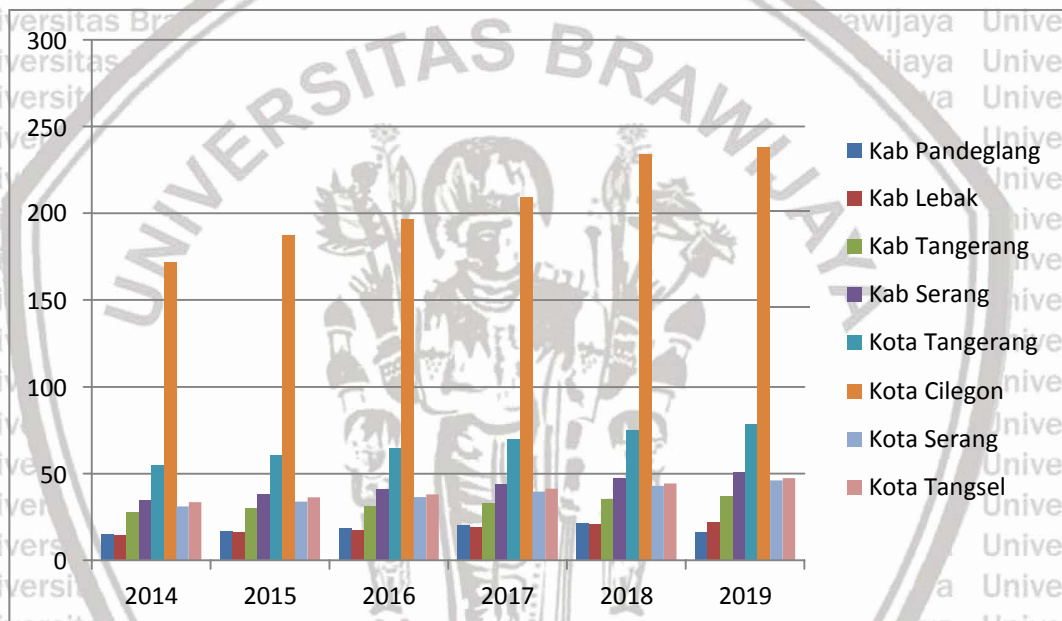
Sumber: BPS (2019)

Berdasar Tabel 4.3 memperlihatkan yakni PDRB kabupaten/kota Provinsi Banten selalu meningkat per tahun. PDRB paling tinggi ialah di Kota Tangerang senilai 111 miliar rupiah, selanjutnya Kabupaten Tangerang senilai 97 miliar di tahun 2019. PDRB yang tinggi pada dua daerah bersangkutan disebabkan mayoritas struktur perekonomian ialah industry pengolahan yang memberi nilai plus yang tergolong tinggi. Sedangkan PDRB paling rendah ialah Kabupaten Pandeglang dan Lebak senilai 19 miliar rupiah dan 20 miliar rupiah. Angka yang

rendah ini, disebabkan salah satunya ialah mayoritas struktur perkonomiannya ialah pertanian yang memberi nilai plus yang sedikit.

Disamping PDRB ADHK, PDRB perkapita juga biasa dipergunakan untuk melihat keadaan ekonomi sebuah wilayah. Dalam perkembangannya, PRDB per kapita sebagai sebuah indicator pengukuran kesuksesan pembangunan wilayah, yang diukur melalui keseluruhan PDRB sebuah wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduknya.

Gambar 4.3 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2019 (juta Rp)



Sumber: BPS (2019), diolah

Berdasarkan Gambar 4.3. tersebut di atas, PDRB perkapita masing-masing Kabupaten atau kota di Provinsi Banten selalu meningkat setiap tahunnya. PDRB perkapita paling tinggi terdapat di Kota Cilegon yaitu 238.4 juta di tahun 2019.

Disamping hal tersebut, PDRB perkapita Cilegon paling tinggi, disebabkan masyarakat Kota Cilegon yang hanya sedikit, berbeda jauh dengan PDRB Kota Cilegon yang besar. Berdasarkan struktur perekonomian, Kota Cilegon di dominasi oleh bidang industry berat, salah satunya ialah perusahaan Krakatau

Steel yang menjadi perusahaan baja paling besar di Indonesia. Disamping industry pengolahan, Kota Cilegon juga didominasi oleh bidang perdagangan, hotel dan restoran. selain itu juga dukungan infrastruktur yang relatif baik dengan adanya pelabuhan Pelindo 3 di Ciwandan semakin mempermudah berkembangnya industri di wilayah Cilegon

4.1.3. Industri

Industri adalah bidang yang bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Provinsi Banten kontribusi bidang industry adalah bidang yang menyumbang terbesar dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi, dimana jumlah industry setiap kabupaten/kota berbeda. Perkembangan jumlah industry pengolahan pada suatu wilayah akan berkorelasi dengan faktor-faktor yang menunjang bagi perkembangan dan kebutuhan sector industry itu sendiri. Hal tersebut bisa mencerminkan para ekonom industry menetapkan area industri yang memiliki efisiensi yang tinggi, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor pendukung dalam terbentuknya suatu aglomerasi. Sebaran industri pengolahan di Provinsi Banten periode 2014-2019 ditampilkan dalam table berikut.

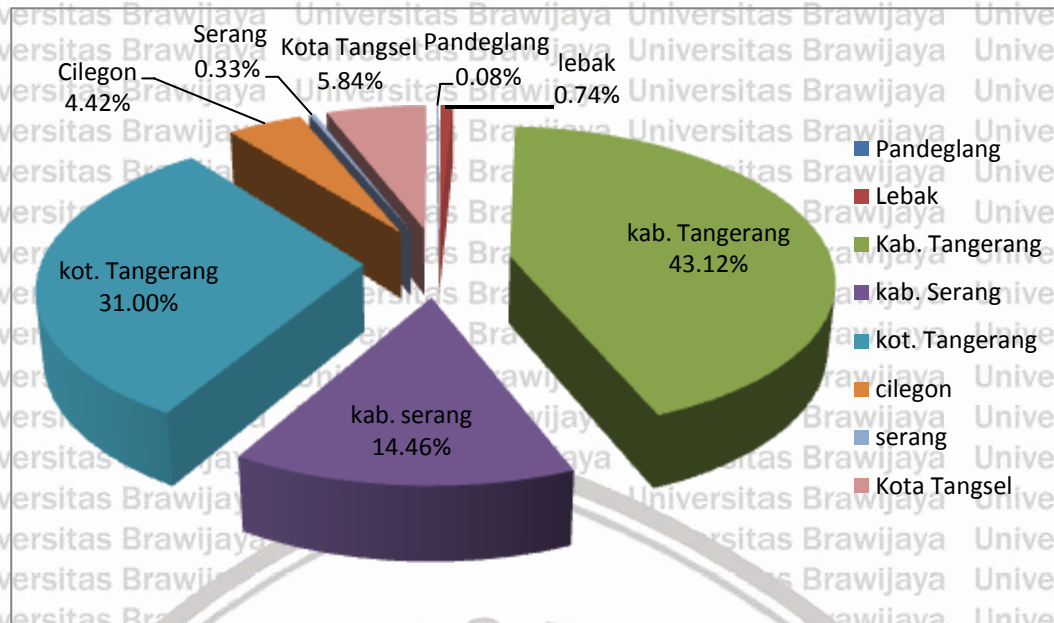
Tabel 4.4 Jumlah Industri Pengolahan di Provinsi Banten Tahun 2014-2019

Kab/Kota	JUMLAH INDUSTRI					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pandeglang	13	13	11	10	9	10
Lebak	20	20	23	27	26	31
kab. Tangerang	782	782	752	1,137	1,131	1,130
kab. Serang	148	213	184	245	236	247
kot. Tangerang	559	559	664	731	731	733
Cilegon	73	81	79	95	86	97
Serang	22	22	25	40	31	39
Kota Tangsel	59	57	144	185	180	129
Banten	1,682	1,747	1,862	2,470	2,430	2,416

Sumber: BPS (2019)

Pada Tabel 4.4 jumlah industry tertinggi dan adanya konsentrasi industry pada dua Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Dua wilayah ini banyak tersebar industri pengolahan baik makanan maupun sektor industri primer lainnya. Dengan tersebarnya industri di dua wilayah ini menunjukkan bahwa tidak meratanya jumlah industri di Provinsi Banten dan hanya terkonsentrasi hanya pada beberapa wilayah saja dan hal ini menyebabkan atau membentuk suatu aglomerasi industri di wilayah Provinsi Banten.

Dengan terdapatnya aglomerasi maka akan meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatnya penghasilan dan urbanisasi dari perdesaan menuju perkotaan yang *notabene* umumnya memiliki tingkat kemajuan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, pemfokusan aktivitas ekonomi pada sebuah wilayah akan sanggup menambah kesenjangan antar wilayah. Pendapat dari Richarcdson dalam J Singgaling (2008) aglomerasi mengakibatkan efiesiensi produksi yang kemudian akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan teori Harrod Dhomar yang menjelaskan jika pembentukan modal akan menambah produktivitas, maka aglomerasi industry di wilayah akan mempercepat penambahan modal yang pada akhirnya peningkatan efiesiensi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.



Sumber: BPS (2019)

Gambar 4.4 Sebaran Tenaga Kerja Industri Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2019

Gambar 4.4 menunjukkan penyebaran tenaga kerja industri di Provinsi Banten tahun 2019 di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang mempunyai tenaga kerja industry tertinggi sebesar 31% dan 43%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di dua kabupaten/kota tersebut menunjukkan adanya spesialisasi di sektor industri. Aglomerasi industri ini akan cenderung memusat pada wilayah yang mempunyai potensi SDA, tenagakerja dan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan industri salah satu faktor penunjang tingginya sektor industri di dua wilayah ini adalah sarana pendukung/infrastruktur khususnya transportasi serta lokasi dua wilayah tersebut berdekatan dengan pusat perekonomian nasional yaitu Provinsi DKI Jakarta.

4.1.4 Infrastruktur & Transportasi Cost

Infrastruktur jalan dan transportasi adalah salah satu faktor yang berperan fundamental pada mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi di sebuah wilayah.

Jika pelaksanaan dalam infrastruktur mobilitasnya tersendat maka dalam keunggulan dari produksi pada sebuah wilayah tidak akan mampu disalurkan secara baik, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi ketimpangan antar wilayah karena tidak lancarnya sarana transportasi dalam hal ini infrastruktur jalan.

Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam menarik para investor untuk berinvestasi. Pemerataan infrastruktur yang baik akan berpengaruh pula pada biaya transportasi pada setiap daerah. Dengan kondisi infrastuktur secara merata juga akan membawa dampak baik pada setiap kabupaten/kota dimana investasi, urbanisasi serta aglomerasi akan merata di setiap daerah.

Banyak terjadi pada suatu wilayah yang memiliki infrastruktur atau fasilitas sangat baik akan tetapi pada beberapa daerah mempunyai akses infrastruktur yang buruk. Kondisi tersebut menjadi faktor pertimbangan investor dalam rencana menanamkan modal pada suatu wilayah. Investor pada umumnya lebih banyak menanamkan modalnya pada daerah yang mempunyai fasilitas yang relatif baik. Hal ini yang menyebabkan beberapa daerah mengalami kemajuaan yang lambat dibandingkan daerah yang memilki fasilitas baik. Faktor pendorong lainnya pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya adalah kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Hal ini juga sebagai salah satu aspek yang memicu munculnya kesenjangan pembangunan pada suatu wilayah. Salah satu indikator dalam mencermati perkembangan pembangunan pada sebuah daerah ialah fasilitas transportasi yaitu jalan. Panjang jalan di Provinsi Banten 2014-2019 ditampilkan dalam table berikut.

Tabel 4.5 Panjang Dan Persentase Jalan Di Provinsi Banten Tahun 2014-2019

Wilayah	Tahun	KEMANTAPAN JALAN			
		Mantap		TidakMantap	
		Panjang (Km)	Persen (%)	Panjang (Km)	Persen (%)
BANTEN	2014	436,49	91,61	40,00	8,39
	2015	446,25	93,65	30,24	6,35
	2016	519,75	92,01	45,13	7,99
	2017	564,89	87,44	70,95	12,56
	2018	627,97	82,41	134,06	17,59
	2019	747,90	98,15	14,13	1,85

Sumber : PUPR (2019)

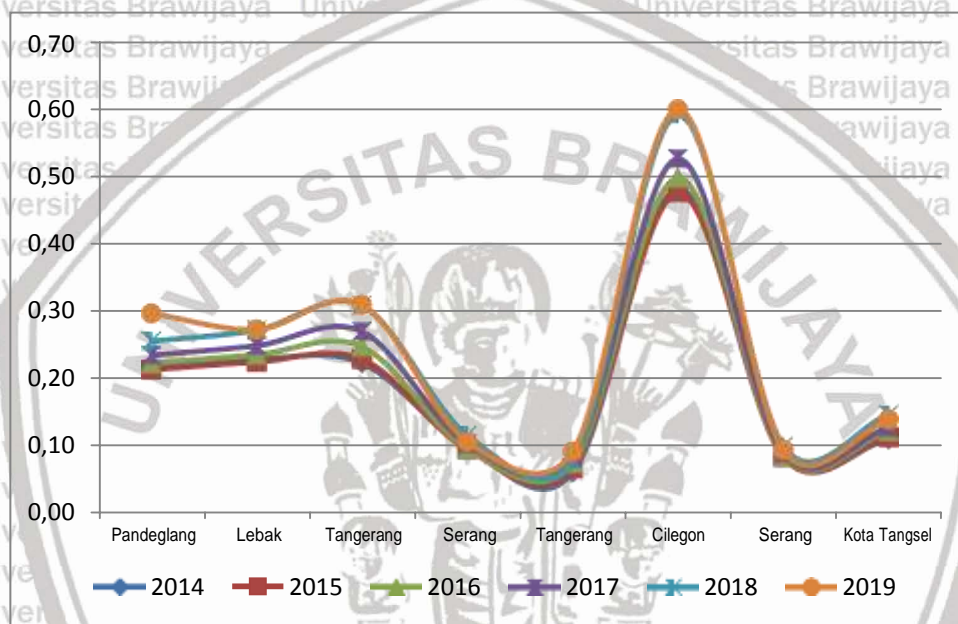
Bedasarkan pada Tabel 4.5, periode tahun 2014-2019 perkembangan jalan di Provinsi Banten semakin baik yang dapat dilihat dari kemantapan jalan mencapai 98,15% pada tahun 2019. Kondisi infrastruktur jalan ini diharapkan dapat mendukung dan mendorong mobilitas kegiatan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat mempercepat pembentukan aglomerasi industri pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten meskipun pada setiap daerah memiliki potensi sumberdaya dan infrastruktur yang berbeda satu dengan lainnya dan biaya transportasi yang dikeluarkan semakin kecil.

4.2. Hasil Pengolahan Data

Pada penelitiannya ini penulis memakai empat variabel yaitu ketimpangan, aglomerasi, urbanisasi dan investasi. Data yang dipakai untuk setiap variabel adalah data panel yang merupakan gabungan data *time series* tahun waktu 2014-2019 dan *cross section* pada 8 (delapan) kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Berikut deskripsi setiap variabelnya yang dipakai dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini.

4.2.1. Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Banten

Ketimpangan penghasilan antar wilayah diukur dengan *indeks williamson* dimana komponen yang dipakai adalah pendapatan perkapita kabupaten bersangkutan, rerata pedapatan per kapita Provinsi Banten, banyaknya penduduk Kabupaten bersangkutan dan banyaknya penduduk Provinsi Banten. Semakin jauh pedapatan per kapita suatu daerah maka semakin besar *indeks williamson* nya.



Sumber: BPS (2019), diolah

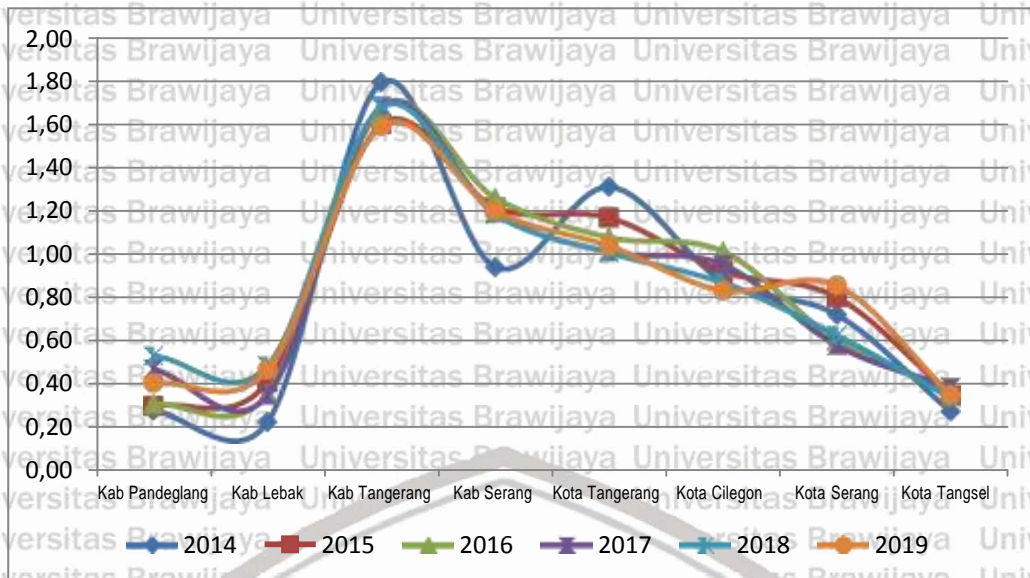
Gambar 4.5. Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2014-2019

Pada Gambar 4.5 menunjukkan bahwa Kota Cilegon mempunyai *indeks williamson* (IW) jauh di atas Kabupaten/Kota lainnya. Pada tahun 2017-2019 IW Kota Cilegon lebih dari 0,5 yang menunjukkan pada wilayah ini memiliki ketimpangan/disparitas pembangunan yang relatif tinggi. Oleh karena itu bisa diasumsikan jika antar kabupaten atau kota pada Provinsi Banten mengalami ketimpangan penghasilan yang relative besar. Hal tersebut berkaitan dengan

perbedaan kemampuan setiap daerah juga factor kepemilikan SDA dan sebaran penduduk yang berdampak pada nilai tambah bruto (PDRB) pada perekonomian antar wilayah di Provinsi Banten. Kota Cilegon dengan nilai IW >0.5 memiliki sebaran industri strategis nasional yang relative tinggi dari pada dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Banten. Sebagaimana yang kita tahu, komoditas industry produksinya terkadang sulit diperkirakan, begitupun yang berkaitan dengan harga. Dalam beberapa tahun belakangan harga sebagian produk industry sifatnya flukualif yang dapat berimplikasi terhadap daerah yang mempunyai industri besar dari sinilah salah satu pendorong ketimpangan antar wilayah di Provinsi Banten khususnya di Kota Cilegon.

4.2.2 Aglomerasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Aglomerasi adalah pemusatan aktivitas ekonomi pada sektor industri yang diukur dengan membandingkan antara karyawan yang bekerja pada bidang industri dibandingkan bidang non industri baik di Kab/Kota maupun tenaga kerja secara keseluruhan di provinsi. Dalam pertumbuhan suatu daerah, salah satu bagian yang menjadi perhatian pembangunan adalah upaya untuk membangun pusat pusat industri (aglomerasi) di daerahnya. Pembangunan pusat-pusat industri di daerah akan membantu untuk menyiapkan lapangan kerja yang mampu mengakomodir angkatan kerja yang tersedia. Gambar 4.6 menunjukkan bahwa tingkat aglomerasi paling tinggi adalah **Kabupaten Tangerang**



Sumber: BPS (2019), diolah

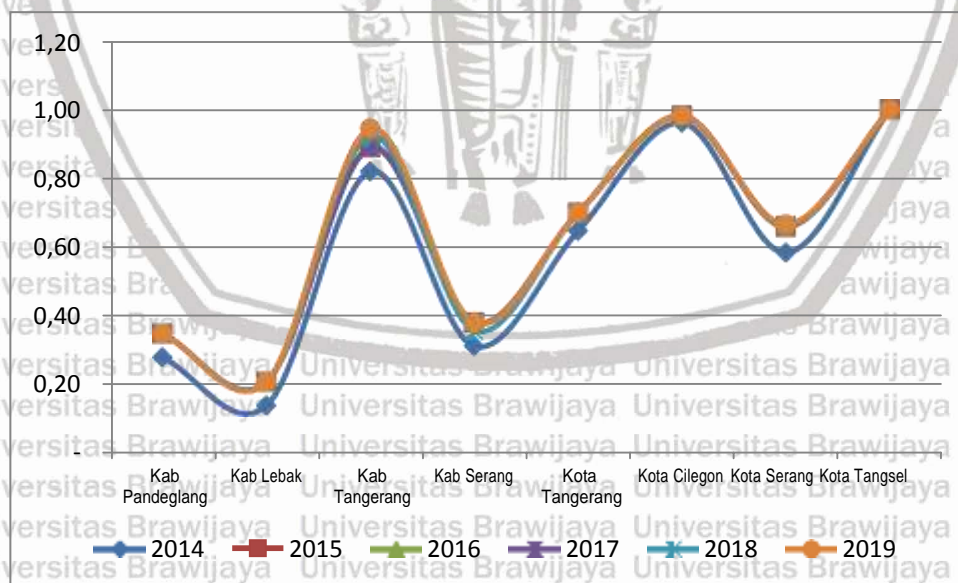
Gambar 4.6 Aglomerasi Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2019

Mengacu dari gambar 4.6 terlihat jika dalam kurun waktu 2014 – 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki tingkat Aglomerasi yang paling tinggi sedangkan Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat Aglomerasi yang paling rendah. Aglomerasi yang tinggi di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut lebih terkonsentrasi. Tangerang merupakan daerah dengan perkembangan yang lebih bagus dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten lainnya. Kabupaten ini berkembang sejalan dengan perkembangan wilayah JaBoDeTaBek dimana Kab.Tangerang memiliki aksesibilitas lebih berkembang dari pada dengan kabupaten atau kota yang lain di Banten. Perkembangan yang lebih dulu terjadi sejalan dengan perkembangan pusat aglomerasi nasional di Jakarta, Bekasi Depok dan Bogor merupakan salah satu faktor penyebab Aglomerasi di Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Banten. Tetapi hal ini tidak terlihat pada Kota Tangerang Selatan yang aglomerasinya kecil, oleh karena daerah yang bersangkutan tidak mempunyai keunggulan komparatif dalam industri dan Tangerang Selatan ialah kota yang

masih berumur muda/baru, yang merupakan daerah otonom bagian dari Provinsi Banten. Berdasarkan UU No 51 tahun 2008 tentang Keputusan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, mempunyai tujuan agar meningkatnya layanan di sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta mampu memberkemampuan pada pemanfaatan potensi suatu daerah. Struktur perekonomian Kota Tangerang Selatan di dominasi oleh pedangan besar dan eceran dan beberapa bisnis real estate, hotel dan konstruksi.

4.2.3 Urbanisasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten

Urbanisasi dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan antara penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi pada setiap Kabupaten/Kota selama periode 2014-2019 bersifat konstan atau tidak berubah (Gambar 4.7). Hal ini terjadi karena data jumlah penduduk yang dipublikasikan BPS merupakan angka perkiraan bukan merupakan sensus, dimana sensus penduduk tidak dilakukan setiap tahun.



Sumber: BPS (2019), diolah

Gambar 4.7 Tingkat Urbanisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2014-2019

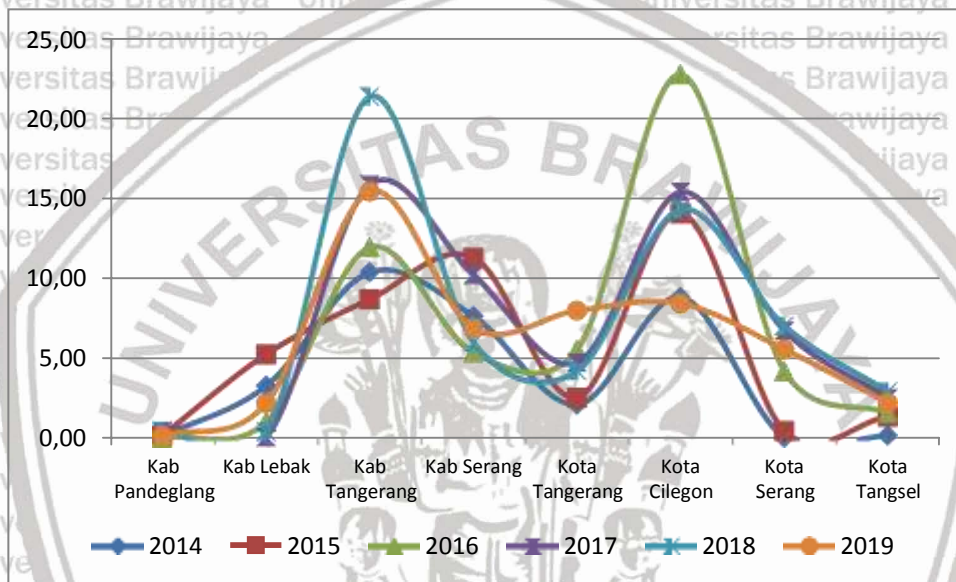
Gambar 4.7 menunjukkan bahwa terdapat Kota yang mempunyai nilai 1 untuk tingkat urbanisasinya yaitu Tangerang Selatan. Hal ini terjadi karena Kota Tangerang Selatan tidak mempunyai wilayah yang masuk sebagai kategori pedesaan sehingga semua penduduk tinggal di perkotaan. Kota Cilegon memiliki tingkat urbanisasi tertinggi kedua, yang menunjukkan bahwa penduduk kota jauh lebih besar dibandingkan penduduk desanya. Hal ini disebabkan karena Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Cilegon telah diputuskan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Cilegon terkenal dengan kota perindustrian dan menjadi sentra kegiatan industri pengolahan di Banten Bagian Barat. Salah satu perusahaan pengolahan baja terbesar di Indonesia, PT. Krakatau Steel, berada di Kota Cilegon. Sektor industri pengolahan menyumbang mayoritas dari PDRB kota Cilegon.

Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 dengan tingkat urbanisasi 0.8 menjadi 0.97 pada tahun 2019. Urbanisasi yang terjadi di daerah ini disebabkan selain wilayah ini lebih dahulu berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya, faktor lainnya adalah bergesernya industri di wilayah DKI Jakarta ke wilayah “pinggir Jakarta” yang salah satu nya adalah Kabupaten Tangerang menjadikan daya tarik perpindahan penduduk pedesaan di luar wilayah Tangerang untuk berkerja di sektor industri yang tersebar di wilayah ini

4.2.4 Investasi Kabupaten/Kota di Propinsi Banten

Setiap wilayah mempunyai kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda sehingga besaran investasi juga berbeda. Selain itu daya tarik masing-masing terhadap investor untuk menginvestasikan dananya di daerah

bersangkutan juga berbeda karena perbedaan potensi sumberdaya dan fasilitas. Perbedaan tersebut kelihatan nyata antar Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten. Kabupaten atau Kota yang ada disekitar kota besar lainnya seperti Jakarta dan akses transportasi yang mudah mempunyai investasi yang jauh lebih besar dibandingkan daerah pinggir seperti Lebak dan Pandeglang. Pada Tahun 2016 Investasi di kota Cilegon mencapai 22,706 Trilyun Rupiah sedangkan di Kabupaten Lebak hanya 35,9 milyar rupiah.



Sumber: BPKM (2020), diolah

Gambar 4.8 investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2019 (Trilyun Rupiah)

Investasi baru terbesar pada 2016 terjadi di Kota Cilegon dengan nominal nya sekitar Rp. 22,7 trilyun, kemudian Kabupaten Tangerang dan Serang. Ketiga wilayah tersebut adalah wilayah mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi investasi di Provinsi Banten. Berdasar pada sektor usaha, investasi paling besar yang masuk ke Kota Cilegon yakni dalam wujud PMA dan PMDN untuk industry kimia, mineral non logam, dan logam dasar. Di Kabupaten Serang investasi dalam wujud PMA ialah usaha tenaga listrik dan karet, produk dari karet dan

plastic (PLTU IPP), sedangkan yang berbentuk PMDN ialah usaha transportasi, gudang, dan telekomunikasi termasuk juga logistic yang terpadu dalam kawasan industry. Sementara dalam investasi di Kabupaten Tangerang investasi PMA paling besar ada pada perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dan industry logamdasar, produk logam, mesin dan elektronik sejalan dengan mulainya bergeser pembangunan di “pinggiran Jakarta”.

4.3 Hasil Estimasi

4.3.1 Pemilihan Model

Dalam penelitian ini memakai model regresi data panel yang meliputi tiga model yakni CE, FE dan RE. Pemilihan model yang akan digunakan/terpilih adalah dengan menggunakan uji lanjut Chow untuk pemilihan model FE – CE sedangkan uji Hausman digunakan untuk menguji lanjut model FE – RE. Resume model regresi data panel hasil pengolahan data *time series* (2014-2018) di delapan kabupaten atau kota di Provinsi Banten menggunakan software EVIEWS 9.0 ditampilkan dalam Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 di bawah, Model **Fixed Effect** dipakai/terpilih untuk dijadikan model dalam analisa ketimpangan di Provinsi Banten dengan nilai R^2 tertinggi 0.971 dan p-value chow test CE-FE sebesar $0.0000 < 0.05$ yang berarti bahwa model terbaik untuk menggambarkan ketimpangan akibat pengaruh Aglomerasi, Urbanisasi dan Investasi adalah Model Fixed Effect dibandingkan dengan model-model yang lain, walaupun *Model Common Effect* juga menunjukkan nilai signifikan yang tinggi juga. Data detail untuk masing-masing model dan uji lanjut disajikan pada **Table Lampiran 2**.

Table 4.6. Summary Data Panel Regression Model

Sample (i)	1: Kab. Pandeglang, 2: Kab. Lebak, 3: Kab. Tangerang, 4: Kab. Serang, 5: Kot. Tangerang, 6: Kot. Cilegon, 7: Kot. Serang, 8: Kot. TangSel
Variable	Independent Variable: X1 (Aglomerasi), X2 (Urbanisasi), X3 (Investasi) Dependent Variable: Y (Ketimpangan)
Common Effect	$Y(it) = 0.216 - 0.181 X_{1(i,t)} + 0.015 X_{2(i,t)} + 0.022 X_{3(i,t)}$ with R-squared is 0.426 and F-Prob is 0.000*
Fixed Effect	$Y(it) = 0.092 + (0.092 + b_{0(i,t)}) - 0.031 X_{1(i,t)} + 0.206 X_{2(i,t)} + 0.002 X_{3(i,t)}$ with R-squared is 0.971 and F-Prob is 0.000*
Random Effect	$Y(it) = (0.092 + b_{0(i,t)}) - 0.028 X_{1(i,t)} + 0.206 X_{2(i,t)} + 0.001 X_{3(i,t)}$ with R-squared is 0.108 and F-Prob is 0.167

Note: sample (i) = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and time (t) = 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Table 4.7. Uji Lanjut Pemilihan Model Regresi Data Panel dengan Uji Chow dan Uji Hausman

Testing	Hypothesis	p-value	Conclusion
Chow Test	H ₀ : Common Effect Model H ₁ : Fixed Effect Model	0.0000 < 0.05	Reject H₀, the best model is fixed effect model
Hausman Test	H ₀ : Random Effect Model H ₁ : Fixed Effect Model	0.0004 < 0.05	Reject H₀, the best model is fixed effect model

4.4. Pembahasan Hasil Temuan

4.4.1 Uji Statistik Analisis Regresi

Uji Signifikansi Parameter

Uji Signifikansi Parameter menggunakan Uji Serentak dan Uji Parsial pada masing-masing variable. Uji serentak digunakan untuk melihat pengaruh semua variable *independent* dalam hal ini aglomerasi, urbanisasi dan investasi di setiap kabupaten atau kota terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten.

Dari hasil uji statistik terlihat bahwa Model Fixed Effect memiliki nilai tertinggi

dibandingkan dengan model yang lainnya yaitu memiliki nilai koefisien determinasi $R^2 = 0.971$ yang mencerminkan bahwa 97.1% ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten yang dipengaruhi oleh adanya aglomerasi, urbanisasi dan investasi pada masing-masing kabupaten/kota secara signifikan dengan tingkat α 5% dengan nilai $F\text{-Prob} = 0.000$ dapat dijelaskan dengan menggunakan Model Fixed Effect. Hubungan aglomerasi, urbanisasi, dan investasi di Kabupaten/kota dapat bersifat positif maupun negatif secara bersama terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Banten.

Selain itu juga, pengujian parameter menggunakan Uji parsial. Uji parsial ini dilaksanakan guna mengetahui pengaruhnya pada setiap variabel bebas dalam hal ini adalah aglomerasi, urbanisasi maupun investasi secara "individu" terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Pada Tabel 4.8 disajikan Uji Parsial untuk ketiga variabel penyebab ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten yang dipakai pada penelitian ini.

Tabel 4.8. Uji Parsial pada masing-masing variable

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
X1	-0.031058	0.008762	-3.544573	0.0011	significant
X2	0.205794	0.071048	2.896539	0.0063	significant
X3	0.001731	0.000400	4.326911	0.0001	significant

Note: taraf significant pada $\alpha=5\%$

Mengacu dari tabel tersebut diketahui jika variable aglomerasi mempunyai hubungan yang negatif dan *significant* terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Hal tersebut memperlihatkan bahwa jika semakin besar aglomerasi pada suatu daerah kabupaten atau kota di Provinsi Banten maka akan mengurangi ketimpangan daerah dan sebaliknya semakin menurun aglomerasi akan semakin besar ketimpangan yang terjadi. Sedangkan variable

Urbanisasi dan Investasi memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten. Kedua variable ini memiliki arti bahwa peningkatan urbanisasi dan investasi di Provinsi Banten cenderung meningkatkan ketimpangan antar Kabupaten/Kota.

Sebagaimana hasil uji pemilihan model bahwa model yang terpilih untuk diinterpretasikan adalah model *Fixed effect*. Persamaan regresi model *Fixed Effect* hasil analisis adalah

$$Y = 0.091919 - 0.031058 X_1 + 0.205794 X_2 + 0.001731 X_3$$

Dimana : Y : Ketimpangan di Provinsi Banten,

X1 : Variable Aglomerasi,

X2 : Variable Urbanisasi,

X3 : Variable Investasi

Konstanta sebesar 0.091919 menunjukkan bahwa ketimpangan antar daerah di Propinsi Banten akan sangat rendah yaitu sebesar 0.091919 jika tidak ada perubahan pada Algomerasi, Urbanisasi dan Investasi. Detail nilai konstanta

Model **Fixed Effect** untuk masing-masing Kota/Kabupaten di Provinsi Banten disajikan pada **Tabel 4.9**

Tabel 4.9 Nilai konstanta Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.091919	0.042475	2.164080	0.0370
X1 (Aglomerasi)	-0.031058	0.008762	-3.544573	0.0011
X2 (Urbanisasi)	0.205794	0.071048	2.896539	0.0063
X3 (Investasi)	0.001731	0.000400	4.326911	0.0001
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.971019	Mean dependent var		0.237292
Adjusted R-squared	0.963186	S.D. dependent var		0.050493
S.E. of regression	0.024922	Sum squared resid		0.022982
F-statistic	123.9677	Durbin-Watson stat		0.866361
Prob(F-statistic)	0.000000			



Ditinjau dari koefisien regresi menunjukkan bahwa Aglomerasi (X_1) mempunyai koefisien regresi negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota atau kabupaten di Provinsi Banten dengan koefisien sebesar -0.031058. Nilai ini menunjukkan jika setiap bertambah 1% aglomerasi yang terjadi di Provinsi Banten maka akan menyebabkan menurunnya ketimpangan penghasilan pada pemerintah daerah kota atau kabupaten di Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebesar 0.031058, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Koefisien regresi pada variabel Urbanisasi (X_2) ditemukan bahwa nilai koefisien regresi positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Banten, dengan koefisiennya 0.205794 yang menunjukkan bahwa jika urbanisasi mengalami peningkatan 1% akan menambah ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Banten yakni 0.205794, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Selanjutnya adalah nilai koefisien regresi pada variabel Investasi (X_3) ditemukan bahwa nilai koefisien regresi bernilai positif (0.001731) terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Banten, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 1% investasi yang ditanamkan akan menambah ketimpangan penghasilan di daerah kota/kabupaten di Provinsi Banten yakni 0.001731, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Nilai *unobserved factor* hasil *model fixed* untuk masing-masing Kabupaten disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Unobserved Factor Model Fixed pada masing-masing Sampel

Cross Section	Unobserved
KAB PANDEGLANG	0.089700
KAB LEBAK	0.122093
KAB TANGERANG	0.015465
KAB SERANG	-0.043391
KOT TANGERANG	-0.135112
KOT CILEGON	0.239173
KOT SERANG	-0.122906
KOT TANGSEL	-0.165021

Berdasarkan hasil pengujian *fixed effect* dan nilai *unobserved*, kemudian dapat disajikan model estimasi masing-masing *cross section* untuk setiap kabupaten atau kota di Provinsi Banten yakni:

$$Y_{KabPandenglang} = 0.091919 - 0.031058 X_1 + 0.205794 X_2 + 0.001731 X_3 + 0.089700$$

$$Y_{KabLebak} = 0.091919 - 0.031058 X_1 + 0.205794 X_2 + 0.001731 X_3 + 0.122093$$

$$Y_{KabTangerang} = 0.091919 - 0.031058 X_1 + 0.205794 X_2 + 0.001731 X_3 + 0.015465$$

$$Y_{KabSerang} = 0.091919 - 0.031058 X_1 + 0.205794 X_2 + 0.001731 X_3 - 0.043391$$

$$Y_{KotTangerang} = 0.091919 - 0.031058 X_1 + 0.205794 X_2 + 0.001731 X_3 - 0.135112$$

$$Y_{KotCilegon} = 0.091919 - 0.031058 X_1 + 0.205794 X_2 + 0.001731 X_3 + 0.239173$$

$$Y_{KotSerang} = 0.091919 - 0.031058 X_1 + 0.205794 X_2 + 0.001731 X_3 - 0.122906$$

$$Y_{KotTangSel} = 0.091919 - 0.031058 X_1 + 0.205794 X_2 + 0.001731 X_3 - 0.165021$$

Jika dibandingkan nilai ketimpangan actual dengan model fixed setiap kabupaten di Provinsi Banten, terlihat nilai residual yang sangat kecil. Residual pada regresi linear sederhana adalah selisih dari nilai perkiraan dan nilai sebenarnya. Harapannya yaitu total residu makin rendah jadi model regresi yang dipakai untuk prediksi ketimpangan dapat handal untuk digunakan. Nilai residual ini

adalah perbedaan antara nilai actual dikurangi dengan nilai model, dalam hal ini nilai tersebut adalah ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten. Nilai residual ini bisa dipakai menjadi salah satu tool untuk pengujian model apakah bagus/dapat diterima ataupun tidak. Semakin besar nilai residual maka akan semakin jauh model regresi itu dari nilai actual dan model regresi tersebut tidak tepat dipakai dalam memperkirakan baik secara interpolasi maupun ekstrapolasi.

Tabel perbandingan rata-rata nilai ketimpangan actual dengan nilai ketimpangan model fixed disajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Nilai Ketimpangan Actual dan Model Fixed pada masing-masing Sampel

Kabupaten	Y Actual	Y fitted	Residual
KAB PANDEGLANG	0,239298	0,239306	-0,00001
KAB LEBAK	0,246089	0,246084	0,00001
KAB TANGERANG	0,263440	0,263435	0,00000
KAB SERANG	0,101069	0,101063	0,00001
KOT TANGERANG	0,074476	0,072659	0,00182
KOT CILEGON	0,528495	0,528481	0,00001
KOT SERANG	0,087711	0,087706	0,00001
KOT TANGSEL	0,125134	0,125133	0,00000

Ditinjau dari nilai *unobserved* per kabupaten atau kota menunjukkan bahwa konstanta tertinggi di kota Cilegon dengan konstanta sebesar 0.239173; diikuti secara berurutan dengan Kabupaten Lebak (0.122093), Kabupaten Padeklang (0.089700), Kabupaten Tangerang (0.015465), Kabupaten Serang (-0.1222906), Kota Serang (-0.122906), Kota Tangerang (-0.135112) dan Kota Tangerang Selatan (-0.165021). Nilai konstanta yang tinggi di Kota Cilegon menunjukkan bahwa di **Kota Cilegon terjadi ketimpangan ekonomi tertinggi** daripada Kota atau kabupeten lain di Provinsi Banten. **Sedangkan ketimpangan ekonomi terendah** terjadi pada Kota Tangerang Selatan dengan konstanta sebesar -0.165021 yang menunjukkan bahwa gap kondisi ekonomi yang paling

merata di seluruh wilayah kota Tangerang Selatan. Kota Cilegon merupakan kota dengan gap kondisi ekonomi paling bervariasi antar wilayah sedangkan Kota Tangerang Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perkotaan dimana penduduk yang tinggal di wilayah tersebut secara umum bekerja kantoran di wilayah Jakarta dengan tingkat pendapatan yang relatif merata menjadi salah satu faktor pendorong dalam rendahnya ketimpangan di wilayah Tangerang Selatan.

Ketimpangan terjadi juga di Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang disebabkan pada kedua Kabupaten tersebut merupakan kabupaten di Provinsi Banten dengan luasan terbesar daripada kabupaten atau kota di Provinsi Banten dan mempunyai gap pendapatan relatif besar antara penduduk perdesaan dan penduduk perkotaan yang *notabene* tinggal di pusat pemerintahan di dua kabupaten tersebut. Selain itu juga sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani dengan ketimpangan yang relatif tinggi antara masyarakat petani dengan non-petani.

4.4.2. Analisa Hubungan Masing-masing Variable Bebas (Aglomerasi, Urbanisasi dan Investasi) dengan Variable Terikat (Ketimpangan)

4.4.2.1. Pengaruh Aglomerasi terhadap Ketimpangan

Hasil analisis memperlihatkan jika variable Aglomerasi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan pada ketimpangan daerah di kabupaten atau kota Provinsi Banten (**Table 4.9**). Hal tersebut memperlihatkan jika semakin besar aglomerasi yang terjadi pada suatu daerah di Banten maka akan mengurangi ketimpangan antar daerah dan sebaliknya semakin menurun aglomerasi akan semakin besar ketimpangan yang terjadi.

Kondisi ini jika ditelusur dengan penelitian terdahulu antara lain oleh Geppert&Stephan, (2008) yang menemukan bahwa aglomerasi berhubungan negative terhadap ketimpangan wilayah di *European Union* untuk periode 1991 – 1995. Aglomerasi merupakan salah satu indicator perkembangan kontribusi industry pada sebuah daerah. Aglomerasi yang cukup besar akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan mengalami perubahan yang signifikan.

Kondisi yang demikian akan menunjang proses pembangunan daerah dengan meningkatnya persiapan lapangan pekerjaan dan taraf penghasilan masyarakatnya. Namun untuk wilayah yang mempunyai taraf aglomerasi kecil akan menjadikan daerahnya tertinggal. Kemudian, adanya konsentrasi aktivitas ekonomi yang sangat besar di daerah tertentu tentu saja akan berpengaruh pada ketimpangan pembangunan antar daerah. Menurut Sjafrizal (2008), konsentrasi ekonomi tersebut terlihat pada aktivitas aglomerasi. Meskipun secara langsung variable aglomerasi tersebut mempengaruhi secara negatif dan signifikan pada ketimpangan antar kabupaten atau kota akan tetapi secara tidak langsung konsentrasi aktivitas ekonominya berdampak pada ketidakstabilan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Banten.

Studi literatur terdahulu lainnya antara lain Ha, Minh Nguyen, Le, Dang Nguyen dan Kien-Trung (2019) menyebutkan jika kegiatan ekonomi mempunyai polakorelasi yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan dimana penurunan ketimpangan dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi. Di lain sisi, bahwa konsentrasi ekonomi yang cukup besar akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Keadaan yang seperti itu akan mengakibatkan proses pembangunan daerah melewati peningkatan penyiapan lapangan pekerjaan dan taraf penghasilan masyarakatnya. Namun untuk daerah yang mempunyai kegiatan ekonomi yang kecil akan mengakibatkan pertumbuhan daerahnya semakin melambat.

Kaitan antara aglomerasi dengan ketimpangan penghasilan antarkabupaten atau kota di Provinsi Banten bisa terlihat dari tingginya rasio PDRB nya yang sangat variatif dan juga jumlah sebaran tenaga kerja, hal tersebut dikarenakan situasi pada masing-masing wilayah mempunyai kelebihan komparatif yang bervariasi, misalnya SDA yang berbeda, faktor produksi infrastruktur yang meliputi fasilitas pendamping, kemampuannya SDM dan luas wilayahnya. Perbedaan tersebut mengakibatkan jumlah rasio PDRB pada masing-masing wilayah berbeda signifikan, serta ditunjang dengan sumbangsih sectoral pada PDRB yang juga tidak sama antar kabupaten atau kota di Provinsi Banten, dimana total PDRB tertinggi terdapat pada Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang memiliki akses pada infrastruktur, SDM dan investasi yang relatif tinggi dan baik dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Banten (**Tabel 4.3**). disamping itu juga jumlah tenaga kerja industry tertinggi ada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang pada (**Gambar 4.4**). Hubungan antara konsentrasi aktivitas ekonomi pada ketimpangan berpengaruh pada menurunnya kesenjangan wilayah yang terdapat di kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Secara komprehensif kegiatan ekonomi yang berlangsung di kabupaten atau kota mempengaruhi menurunnya taraf kesenjangan antar kabupaten atau kota meskipun perubahan dari kegiatannya terpusat pada aglomerasi antar wilayahnya masih rendah dan pada kurun waktu tahun 2014-2019 aglomerasi di Provinsi Banten menunjukkan penurunan (**Gambar 4.6**). Hal ini membuat ketimpangan di Provinsi Banten masih relatif tinggi.

Aglomerasi yang tinggi di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut lebih terkonsentrasi. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan perkembangan yang relatif lebih bagus dari pada kabupaten atau kota di Provinsi Banten lainnya. Kabupaten ini telah

berkembang sejalan dengan perkembangan wilayah JaBoDeBek dimana Tangerang memiliki aksesibilitas relatif lebih baik dari pada kota yang lain di Banten.

Hubungan antara aglomerasi pada kesenjangan antar kabupaten atau kota berpengaruh pada menurunnya kesenjangan yang terdapat pada kabupaten ataupun kota di Provinsi Banten, yang mana secara komprehensif kegiatan ekonomi yang berlangsung di kabupaten atau kota mempengaruhi penurunan taraf kesenjangan yang dialami kabupaten ataupun kota di Provinsi Banten, seperti Penelitian Damayanti (2017) aglomerasi mempengaruhi penurunan ketimpangan di Pulau Jawa yang menyebabkan *spread effect* dengan percepatan aglomerasi dapat membuat cepatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah terpusat dan yang dampaknya bisa dirasakan daerah sekitarnya untuk merevitalisasi ketimpangan regional.

4.4.2.2. Pengaruh Urbanisasi terhadap Ketimpangan

Hasil estimasi regresi memperlihatkan jika urbanisasi mempengaruhi secara positif dan signifikan pada kesenjangan wilayah pada kabupaten atau kota se Provinsi Banten. Hal ini memiliki arti bahwa peningkatan urbanisasi di Provinsi Banten cenderung meningkatkan ketimpangan antar Kabupaten/Kota.

Fenomena ini terjadi pada data yang disajikan pada **Gambar 4.7** bahwa urbanisasi paling tinggi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon dimana adanya konsentrasi aktivitas industri di daerah tersebut.

Korelasi positif antara konsentrasi masyarakat dengan aglomerasi tersebut akan mengakibatkan semakin besarnya konsentrasi masyarakat, dengan demikian mengakibatkan ketimpangan yang besar pada wilayah perkotaan tersebut.

Sehingga urbanisasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah. Peningkatan yang signifikan terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang

dan Kota Cilegon di Provinsi Banten berbanding lurus dengan peningkatan ketimpangan antar kabupaten yang terjadi dan adanya banyak jumlah industri pengolahan dari ketiga wilayah tersebut yang menjadi daya tarik untuk bekerja di wilayah tersebut (Tabel 4.4).

Kota Tangerang Selatan tidak mempunyai wilayah yang masuk sebagai kategori pedesaan sehingga semua penduduk tinggal di perkotaan sedangkan

Kota Cilegon memiliki tingkat urbanisasi tertinggi kedua, yang menunjukkan bahwa penduduk kota jauh lebih besar dibandingkan penduduk desanya. Hal ini disebabkan Kota Cilegon masuk kedalam system perkotaan nasional yaitu ditetapkannya Kota Cilegon menjadi salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Kota Cilegon terkenal dengan kota industri dan menjadi sentra kegiatan industri pengolahan di Banten Bagian Barat. Salah satu perusahaan pengolahan tersebut adalah industri baja terbesar di Indonesia yaitu PT. Krakatau Steel. Sektor industri pengolahan yang banyak ini menyumbang mayoritas dari PDRB Kota Cilegon.

Urbanisasi di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 dengan tingkat urbanisasi 0.8 menjadi 0.97 pada tahun 2019. Urbanisasi yang terjadi di daerah ini disebabkan selain wilayah ini lebih dahulu berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya, faktor lainnya adalah bergesernya industri di wilayah DKI Jakarta ke wilayah “pinggir Jakarta” yang salah satunya adalah Kabupaten Tangerang. Kondisi ini menjadikan daya tarik perpindahan penduduk pedesaan di luar wilayah Tangerang untuk berkerja di sektor industri yang tersebar di wilayah ini

Studi literatur sebagai pertimbangan pendukung asumsi yang dilakukan penulis diperoleh dari penelitian terdahulu antara lain adalah studi oleh McGranahan dan Satterthwaite pada tahun 2014, dimana faktor urbanisasi

mengacu pada meningkatnya jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan. Nguyen & Nguyen (2018) dan Henderson (2003) menyatakan bahwa urbanisasi dapat mempunyai dampak pertumbuhan yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan sehingga menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Bertambahnya proses urbanisasi tidak luput dari peraturan pembangunan di kota, terutama pembangunan ekonomi yang pemerintah kembangkan. Seperti yang kita ketahui meningkatnya jumlah penduduk akan berpengaruh positif pada peningkatan urbanisasi di suatu daerah. Terdapat kecenderungan jika urbanisasi akan terjadi di sebuah wilayah yang mempunyai taraf konsentrasi masyarakat yang cukup besar.

Selain itu juga Henderson (2003) juga mengemukakan bahwa dengan adanya pemusatan atau konsentrasi sumberdaya manusia pada kota-kota besar maka akan menyebabkan kota kecil dan daerah pedesaan kekurangan sumber daya manusia sehingga terjadi kerugian ekonomi (*diseconomic*). Urbanisasi yang terjadi di Provinsi Banten antar Kota/Kabupaten relatif sangat berbeda antara kabupaten/kota lainnya. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di suatu daerah dan sesuai dengan pendapat Nguyen & Nguyen (2018) dan Henderson (2003) yang menyatakan bahwa urbanisasi dapat mempunyai dampak pertumbuhan yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Selain itu juga, pendapat ini didukung hasil penelitian Saputra & Rahayu (2015) yang memberikan kesimpulan jika urbanisasi mempengaruhi secara positif pada kesenjangan pembangunan suatu wilayah.

4.4.2.3. Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan

Hasil prediksi regresi memperlihatkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari investasi pada ketimpangan di setiap Kabupaten atau Kota di

Provinsi Banten. Menurut Mankiw (2014) investasi merupakan sebuah bagian penyusun PDRB. Makin besar tingkat penanaman modal suatu daerah dan asumsi komponen lain dianggap tetap (*ceteris paribus*) maka akan berakibat pada semakin tinggi PDRB wilayah tersebut. Dalam model pertumbuhan neoklasik tradisional, peningkatan modal menyebabkan pertumbuhan hanya karena modal merupakan faktor produksi. Pada kabupaten/kota yang mempunyai investasi relatif tinggi maka PDRB perkapitanya menjadi semakin menjauhi pendapatan perkapita rata-rata provinsi yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan yang semakin besar.

Perkembangan investasi yang tidak merata tersebut juga terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Banten yang terlihat nyata di Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang karena adanya konsentrasi industri di wilayah tersebut (**Gambar 4.8**). Tingginya investasi di kedua daerah itu terkait dengan pengaruh bidang industry manufaktur yang menyumbang 30% dari total PDRB sehingga menjadi tulang punggung perekonomian di daerah tersebut (BPS Provinsi Banten, 2019). Investasi di Provinsi Banten relatif masih tidak merata pada tahun 2019, hal tersebut terlihat masih belum meratanya persentase investasi di kabupaten atau kota Provinsi Banten. Investasi terbesar terjadi di Kabupaten Tangerang memiliki dengan nilai investasi 31,61% dari total Investasi Provinsi Banten. Di lain sisi, Kabupaten Pandeglang hanya mempunyai investasi kurang dari 1% dari total Investasi Provinsi Banten. Penyebab hal ini salah satunya adalah karena investor sebagian besar masih tidak tertarik berinvestasi pada sector pertanian dan perikanan yang mendominasi di Kabupaten Pandeglang sehingga menjadikan kabupaten ini lebih sulit untuk menandingi kedua wilayah tersebut untuk mendatangkan investasi. Selain itu juga di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak letak geografisnya kurang mendukung adanya investor, diperlukan intervensi pemerintah untuk melakukan

pembangunan infrastruktur yang lebih baik khususnya aksesibilitas agar kedua kabupaten ini dapat menjadi lebih berkembang dan di akses semakin mudah oleh investor.

Investasi baru terbesar pada 2016 berada di Kota Cilegon yang angkanya hingga Rp 22,7 triliun, diikuti KabupatenTangerang dan Kota Tangerang di tunjukan **Gambar 4.8**. Ketiga daerah tersebut adalah wilayah dengan

sumbangan tertinggi pada investasi di Provinsi Banten. Sesuai lapangan usaha, investasi paling tinggi yang ada di Kota Cilegon berwujud PMA serta PMDN yaitu industry kimia, industri mineral non logam, serta industry logam dasar. Di

Kabupaten Serang, investasi PMA berupa industri ketenagalistrikan PLTU IPP (*Independent Power Producer*) serta industry karet, barang dari karet serta

plastik, pabrik ban, serta pabrik otomotif baru, sedangkan untuk PMDN yaitu kegiatan transportasi, gudang, serta telekomunikasi (termasuk logistik yang tergabung di daerah industri). Sementara dalam investasi di Kota/Kabupaten

Tangerang investasi PMA tertinggi untuk perumahan, daerah industri, serta perkantoran dan industry logam dasar, barangn logam, mesin serta elektronik sejalan dengan mulainya bergeser pembangunan ke daerah “pinggiran Jakarta”.

Investasi adalah sebuah hal utama untuk pembangunan ekonomi sebab investasi diperlukan sebagai aspek yang menunjang meningkatkan kegiatan produksi. Investasi berperan aktif untuk menetapkan tingkat *output*, serta laju

pertumbuhan *output* berdasarkan laju investasi. Menurut Syafrizal (2008), kemampuan yang berfungsi banyak untuk mendatangkan investasi swasta kesebuah wilayah yaitu manfaat tempat yang dipunyai sebuah daerah. Investasi

biasanya meningkatkan ketidakmerataan dimana wilayah masih berkembang pasti memiliki permintaan barang serta pelayanan yang tinggi dapat meningkatkan investasi dan nantinya akan mempengaruhi peningkatan

penerimaan suatu daerah. Sementara pada wilayah yang tidak berkembang, permintaan tentang investasi sedikit dikarenakan oleh penerimaan masyarakat yang relatif kecil. Pada dasarnya investasi swasta terpengaruh dari kemampuan pasar. Perbedaan itulah yang menimbulkan ketimpangan tiap daerah menjadi semakin luas. Hal ini juga terjadi di Provinsi Banten yang notabene adalah provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat, dimana pada saat ini masih dalam posisi tahap awal pembangunan. Dari hipotesa Neo-Klasik, permulaan dari tahap pembangunan membuat ketimpangan menjadi naik, tahap ini terjadi sampai ketimpangan berada di titik puncak dan akan tetap berjalan sehingga secara bertahap ketimpangan itu cenderung menjadi lebih kecil.

4.5. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian ini yang memperlihatkan jika aglomerasi memiliki pengaruh negatif serta signifikan, urbanisasi serta investasi seluruhnya mempengaruhi secara positif signifikan pada peningkatan ketimpangan antar Kabupaten atau Kota, maka hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi kepada pemerintah Provinsi Banten yaitu:

- 1) Pemerintah yang mempunyai kekuasaan di tiap daerah ini belum secara maksimal mengatur penempatan industry secara merata. Sehingga aktivitas ekonomi hanya berpusat di daerah-daerah tertentu dan pada akhirnya terjadi ketimpangan pada setiap daerah. Dengan ketidakmerataan ini dapat menghalangi aktivitas ekonomi pada beberapa daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.
- 2) Terkait dengan urbanisasi, masih belum ada upaya dari pemerintah kecamatan untuk berkoordinasi dengan pemerintahan desa dalam menggalakan penduduk umur produktif dalam menjalankan aktivitas yang

bisa menaikan mutu agar bisa menciptakan peluang usaha yang dapat membangun lapangan usaha sendiri. Hal ini yang menyebabkan masih banyak terjadinya urbanisasi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten, masih banyak masyarakat yang mencari pekerjaan di wilayah lain.

3) Investasi biasanya meningkatkan ketidakmerataan dimana wilayah masih berkembang pasti memiliki permintaan barang serta pelayanan yang tinggi dapat meningkatkan investasi dan nantinya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan suatu daerah. Sementara pada wilayah yang tidak berkembang, permintaan tentang investasi sedikit dikarenakan oleh penerimaan masyarakat yang relatif kecil. Pada dasarnya investasi swasta terpengaruh dari kemampuan pasar. Perbedaan itulah yang menimbulkan ketimpangan tiap daerah menjadi semakin luas. Hal ini juga terjadi di Provinsi Banten yang notabene adalah provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat, dimana pada saat ini masih dalam posisi tahap awal pembangunan. Oleh karena itu, peran investasi di beberapa daerah di Provisnsi Banten masih belum tinggi, sehingga PMA masih kurang di beberapa daerah.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Kesimpulan**

Berdasar pada data dan hasil analisa serta pembahasan mengenai ketimpangan kabupaten/kota terhadap aglomerasi, urbanisasi dan investasi pada tahun 2014-2019 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Aglomerasi mempengaruhi secara signifikan pada ketimpangan antar Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten. Pada kurun waktu tahun 2014-2019 aglomerasi di Provinsi Banten menunjukkan penurunan akan tetapi masih relatif tinggi. Aglomerasi tertinggi di provinsi Banten terdapat di Kabupaten Tangerang dan kota tangerang yang dimana persebaran tenaga kerja industri tersebar sebesar 41% di kabupaten Tangerang dan 31% pada Kota Tangerang
- 2) Urbanisasi mempengaruhi secara positif dan signifikan pada ketimpangan antar Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten. Hal tersebut artinya makin besar urbanisasi makin tinggi ketimpangan penerimaan daerah. Urbanisasi paling tinggi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon dimana adanya konsentrasi aktivitas industri di daerah tersebut yang menjadi daya tarik perpindahan tenaga kerja produktif pada ketiga wilayah tersebut
- 3) Investasi mempengaruhi secara positif dan signifikan pada ketimpangan antar Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten. Hal tersebut artinya makin besar investasi makin tinggi ketimpangan penerimaan daerah. Investasi tertinggi di Provinsi Banten terdapat di Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang. Tingginya investasi di kedua daerah itu terkait dengan

pengaruh bidang industri manufaktur yang menyumbang 30% dari total PDRB Provinsi Banten.

5.2 Saran Penelitian Lanjutan

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dirumuskan sebelumnya maka diberikan saran yang menyangkut penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dibutuhkan fungsi pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur penempatan industry secara merata. Agar aktivitas ekonomi tidak hanya berpusat di daerah-daerah tertentu dan pada akhirnya agar daerah lain tidak tertinggal. Sehingga dibutuhkan perluasan titik-titik pertumbuhan. Dengan perluasan titik-titik pertumbuhan itu bisa berdampak tersebar serta menghalangi terfokusnya aktivitas ekonomi untuk sejumlah daerah tertentu.

Terkait hal ini pemerintah mempunyai alat regulasi dengan adanya penataan industri yang dapat menyebar secara merata di wilayahnya. Adanya sebaran ruang tempat untuk industry dalam rancangan penataan ruang daerah dapat mengatur pengembangan tempat industry sehingga mempercepat jalannya terbentuk aglomerasi baru yang dapat meminimalisir kesenjangan antar Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten.

Program penataan ruang daerah tersebut begitu vital mengingat posisi daerah yang sangat berpengaruh pada preferensi perusahaan industri.

2. Terkait hal urbanisasi, pemerintah kecamatan berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam menggalakan penduduk umur produktif agar menjalankan aktivitas yang bisa menaikkan mutu supaya bisa membuat lapangan usaha sendiri, contohnya: pelatihan karangtaruna sector kewirausahaan. Oleh karena itu, dapat membangun wilayahnya dengan tidak keluar mencari pekerjaan di wilayah orang lain. Dalam menghalangi ledakan populasi yang terkonsentrasi di kota, pertama, dibutuhkan

penguatan bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama di sejumlah wilayah di luar kota besar. Bantuan di bidang tersebut begitu utama agar memastikan tahap ekonomi bisa disalurkan dengan merata. Dan juga, lapangan kerja yang diserap menjadi semakin transparan serta tidak sekedar berdasarkan industrialisasi kota besar. UKM yang menghasilkan produk buatan lokal perlu pemasaran yang efisien lewat bantuan pemerintah yang berwujud integritas serta regulasi prioritas.

3. Peran investasi harus lebih ditingkatkan lagi, terutama PMA yang masih kurang di beberapa daerah, karena dengan adanya investasi ini maka akan meningkatkan atau mengembangkan daerah yang memiliki SDA serta keunggulan suatu daerah tersebut sehingga tidak tertinggal dengan daerah sekitarnya di Provinsi Banten. Pemerintah daerah juga harus turut membantu mengoptimalkan berbagai potensi yang terdapat di daerahnya, karena tanpa adanya bantuan dari peran pemerintah, maka investasi tentunya pasti tidak akan masuk ke daerah tersebut karena dianggap tidak memiliki potensi yang besar.

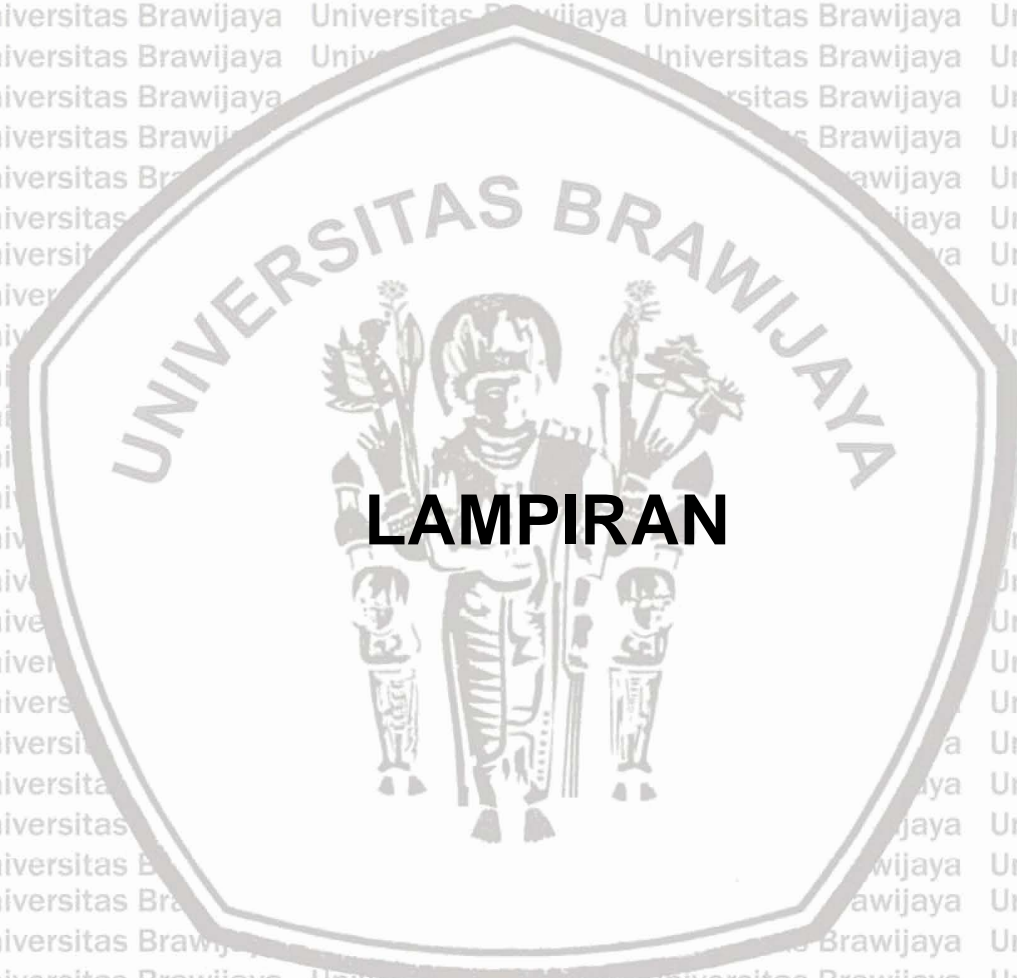
Penelitian seterusnya diharap bisa membenahi tahun penelitian yang terbaru serta jangka waktu yang makin lama, oleh karenanya bisa memberi prediksi ketimpangan pembangunan tiap daerah di Provinsi Banten dengan makin luas. Penelitian yang akan datang diharap bisa mengamati variabel lain di luar variabel penelitian ini supaya mendapatkan hasil penelitian yang makin beragam dan mencerminkan aspek yang berpengaruh pada ketimpangan pembangunan di setiap daerah khususnya di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipuryanti, N. L. P. . and Sudibia, I. K. (2015) 'Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali', *Piramida*, 11(1), pp. 20-28.
- Arsyad, L. (2015) *Ekonomi Pembangunan*. 5th edn. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aziz, N. N. A., Hassan, W. H. A. W. and Saud, N. . (2012) 'The Effects of Urbanization towards social and cultural changes among Malaysian Settlers in the Federal Land Development Schemes (FELDA), Johor Darul Takzim', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, (68), pp. 910-920.
- Bappenas (2017) *Prakarsa Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengurangan Kesenjangan Wilayah dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Bloom, D. . et al. (2010) *Urban Settlement: Data, Measures, and Trends*.
- BPKM (2020) *Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten/Kota 2014-2019*. Banten: BPKM Provinsi.
- BPS (2019) *Provinsi Banten Dalam Angka*. Banten: BPS.
- BPS (2020a) *Analisis Sosial Ekonomi Provinsi Banten 2019*. Banten: BPS.
- BPS (2020b) *Provinsi Banten dalam Angka 2020*. Banten.
- Brulhart, M. and Sbergami, F. (2010) 'Agglomeration and Growth: Cross-country Evidence', *Journal of Urban Economics*, (65), pp. 48-63.
- Cooper, D. . and Schindler, P. . (2013) *Business Research Methods*. 12th edn. New York: McGraw-Hill.
- Damayanti, L. (2017) 'Analisis Dampak Aglomerasi terhadap Ketimpangan Regional Pulau Jawa', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2), pp. 1-10.
- Danawati, S., Bendesa, I. K. . and Made, S. . (2016) 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali', *E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(7), pp. 2123-2160.
- Dhyatmika, K. . and Atmanti, H. . (2013) 'Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran', *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2), pp. 1-8.
- Dumairy (1996) *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Geppert, K. and Stephan, A. (2008) 'Regional Disparities in the European Union: Convergence and Agglomeration.', *Regional Science Association International*, 87(2), pp. 193-217.
- Hariani, P. and Syahputri, A. (2016) 'Analisis Ketimpangan Ekonomi dan

- Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara', *Jurnal Ekonomikawan*, 16(1), pp. 56-76.
- Hayami, Y. (2001) *Development Economics From the Poverty to the Wealth of Nations*. 2nd edn. New York: Oxford University Press.
- Henderson, V. (2003) 'The Urbanization Process and Economic Growth: The So-What Question', *Journal of Economic Growth*, (8), pp. 47-71.
- Hussuen, M. (2019) 'Ketimpangan Antar Wilayah Masih Jadi Tantangan Pembangunan Nasional', in *Seminar Nasional Geografi III: Peran Keilmuan Geografi Dalam Agenda Pembangunan Nasional 2019-2024*. Yogyakarta: UGM.
- Indriantoro, N. and Supomo, B. (2014) *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Aplikasi Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Jhingan (2010) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. 13th edn. Jakarta: Rajawali Press.
- Kaya, A. and Koc, M. (2019) 'Over-Agglomeration and Its Effects on Sustainable Development: A Case Study on Istanbul', *Sustainability*, 11(135), pp. 1-23.
- Kuncoro, M. (2006) *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta. BPF.
- Kuznet, S. (1955) 'Economic Growth and Income Inequity', *The American Economic Review*, 45(1), pp. 1-28.
- Mankiw, N. . (2014) *Teori Makroekonomi*. 5th edn. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- McGranahan, G. and Satterthwaite (2014) *Urbanisation Concepts And Trends*. London.
- Myrdal, G. (1957) *Economic Theory and Under-development Region*. London: Gerald Duckworth.
- Nakamura, R. (2008) 'Agglomeration Effects on Regional Economic Disparities: A Comparison between the UK and Japan', *Urban Studies*, 45(9), pp. 1947-1971.
- Nguyen, H. M. and Nguyen, L. D. (2018) 'The Relationship Between Urbanization and Economic Growth: An Empirical Study on ASEAN Countries', *International Journal of Social Economics*, 5(2), pp. 316-339.
- PUPR, K. (2019) *Kemantapan Jalan Provinsi Banten 2014-2019*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Rizky, R. L., Agustin, G. and Mukhlis, M. (2016) 'Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia', *JESP*, 8(1), pp. 9-16.
- Saputra, H. and Rahayu, S. (2015) 'Hubungan Tingkat Urbanisasi dan Tingkat Ketimpangan Wilayah di Daerah Pantura Jawa Tengah', *Jurnal Teknik PWK*, 4(4), pp. 737-752.

- Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2016) *Research Methods for Business Students*. 7th edn. England.
- Sharimakin, A., Oseni, M. . and Adegboye, A. C. (2015) 'Education, Labour Productivity and Income Inequality In Nigeria', *Annals of the University of Petroșani, Economics*, 15(1), pp. 295-306.
- Sukirno, S. (2010) *Makroekonomi:Teori Pengantar*. 3rd edn. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, R. (2012) 'Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia.', *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(1), pp. 29-50.
- Sutha, I. P. G. . (2000) *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD.
- Syafrizal (2008) *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Baduose Media.
- Tambunan, T. (2001) *Perekonomian Indonesia :Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tjiptoherijanto, P. (1999) 'Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia', *Populasi*, 10(2), pp. 57-72.
- Todaro, M. . and Smith, S. . (2014) *Economic Development*. 12th edn. New York: pearson.
- Trullen, J. (2015) 'Giacomo Becatini and the Marshall's Method', *Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research*, (32), pp. 43-60.
- Utari, E., Zainudin, S. and Rahim, M. (2017) 'Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa', *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 2(1), pp. 72-85.
- Williamson, J. . (1965) 'Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns', *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), pp. 1-84.
- Yeniwati (2013) 'Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera', *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(3), pp. 1-21.



LAMPIRAN

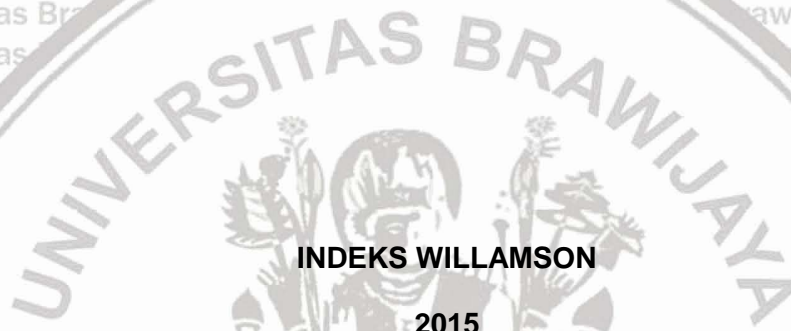
Lampiran 1: Data Penelitian

Kabupaten	Tahun	Y (Ketimpangan)	X1 (AGL)	X2 (URB)	X3 (INV dalam rupiah)
KabPandeglang	2014	0.218076138	0.2778	0.2782	132,364,000,000.00
KabPandeglang	2015	0.212091966	0.2983	0.3475	187,229,454,000.00
KabPandeglang	2016	0.221892875	0.3081	0.3475	35,924,180,000.00
KabPandeglang	2017	0.233527585	0.4690	0.3475	444,877,715,000.00
KabPandeglang	2018	0.254458075	0.5304	0.3475	407,310,410,000.00
KabPandeglang	2019	0.295741545	0.4048	0.3475	136,394,310,000.00
KabLebak	2014	0.228251502	0.2243	0.1384	3,271,746,000,000.00
KabLebak	2015	0.223509041	0.4079	0.2077	5,250,090,222,000.00
KabLebak	2016	0.234366097	0.3533	0.2077	1,022,056,460,000.00
KabLebak	2017	0.247851412	0.3468	0.2077	58,006,060,000.00
KabLebak	2018	0.270911584	0.4840	0.2077	403,900,560,000.00
KabLebak	2019	0.271642593	0.4655	0.2077	2,197,142,882,000.00
KabTangerang	2014	0.221715629	1.7891	0.8200	10,367,700,300,000.00
KabTangerang	2015	0.227831019	1.5982	0.8893	8,676,361,200,000.00
KabTangerang	2016	0.24633983	1.6751	0.8893	11,926,994,390,000.00
KabTangerang	2017	0.268808245	1.6811	0.8893	15,824,678,055,000.00
KabTangerang	2018	0.307596887	1.6750	0.9246	21,333,899,494,000.00
KabTangerang	2019	0.30834742	1.5881	0.9448	15,403,423,131,000.00
KabSerang	2014	0.096192385	0.9383	0.3107	7,621,513,200,000.00
KabSerang	2015	0.093650593	1.2135	0.3801	11,278,992,600,000.00
KabSerang	2016	0.09539239	1.2582	0.3801	5,346,159,200,000.00
KabSerang	2017	0.101484015	1.1885	0.3801	10,196,203,855,000.00
KabSerang	2018	0.114603618	1.1828	0.3563	5,973,613,910,000.00
KabSerang	2019	0.10508988	1.1978	0.3801	6,856,554,080,000.00
KotTangerang	2014	0.059266306	1.3091	0.6471	2,093,583,700,000.00
KotTangerang	2015	0.065691064	1.1670	0.7000	2,521,746,200,000.00
KotTangerang	2016	0.073630335	1.0762	0.7000	5,520,170,810,000.00
KotTangerang	2017	0.080850139	1.0091	0.7000	4,715,400,520,000.00
KotTangerang	2018	0.077349688	1.0055	0.7000	4,194,682,355,000.00
KotTangerang	2019	0.090065714	1.0368	0.7000	7,970,792,950,000.00
KotCilegon	2014	0.481409371	0.8738	0.9615	8,807,956,100,000.00
KotCilegon	2015	0.47540513	0.9187	0.9826	14,042,636,900,000
KotCilegon	2016	0.49756207	1.0113	0.9826	22,706,566,310,000
KotCilegon	2017	0.525627894	0.9514	0.9826	15,373,400,470,000
KotCilegon	2018	0.591787086	0.8658	0.9826	14,292,247,890,000
KotCilegon	2019	0.599176548	0.8307	0.9826	8,414,135,533,000
KotSerang	2014	0.082218189	0.7193	0.5832	33,246,000,000.00
KotSerang	2015	0.081997421	0.8000	0.6582	443,975,800,000.00
KotSerang	2016	0.084256303	0.6001	0.6582	4,176,606,590,000.00
KotSerang	2017	0.087388492	0.5771	0.6609	6,712,999,940,000.00
KotSerang	2018	0.097928341	0.6248	0.6634	7,010,967,082,000.00
KotSerang	2019	0.092475795	0.8542	0.6657	5,542,621,422,000.00
KotTangsel	2014	0.108647232	0.2730	1.0000	168,726,400,000.00
KotTangsel	2015	0.111819348	0.3495	1.0000	1,354,438,800,000.00
KotTangsel	2016	0.120705768	0.3649	1.0000	1,587,083,930,000.00
KotTangsel	2017	0.126071629	0.3844	1.0000	2,500,055,910,000.00
KotTangsel	2018	0.145182473	0.3367	1.0000	2,906,424,213,000.00
KotTangsel	2019	0.138379655	0.3495	1.0000	2,210,007,416,000.00



**INDEKS WILLIAMSON
2014**

Kab/Kota	$(Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})$	F_i / n_i	$\text{akar } ((Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})) * F_i / n_i$	IW
Pandeglang	1075.758002	0.102317485	10.4913704	0.218076
Lebak	1112.139127	0.108421725	10.98089443	0.228252
Tangerang	404.7641016	0.281085714	10.66646177	0.221716
Serang	170.0090016	0.12596724	4.627695401	0.096192
Tangerang	47.21407656	0.172183829	2.851227894	0.059266
Cilegon	15371.35035	0.034895161	23.16000305	0.481409
Serang	287.9384766	0.054335573	3.955414287	0.082218
Kota Tangsel	212.5399516	0.128541955	5.226882527	0.108647



**INDEKS WILLAMSON
2015**

Kab/Kota	$(Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})$	F_i / n_i	$\text{akar } ((Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})) * F_i / n_i$	IW
Pandeglang	1263.358164	0.098377238	11.14834908	0.212092
Lebak	1316.510514	0.104842783	11.74847336	0.223509
Tangerang	503.2731391	0.284967043	11.97565273	0.227831
Serang	199.1979391	0.121649102	4.92262638	0.093651
Tangerang	69.49306406	0.171570975	3.452968687	0.065691
Cilegon	18199.69629	0.034311229	24.98907639	0.475405
Serang	346.0995141	0.053675003	4.310091913	0.081997
Kota Tangsel	264.5095641	0.130606627	5.877644255	0.111819



INDEKS WILLIAMSON

2016

Kab/Kota	$(Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})$	F_i / n_i	$\text{akar} ((Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})) * F_i / n_i$	IW
Pandeglang	1382.817189	0.098377238	11.66352161	0.221893
Lebak	1447.517139	0.104842783	12.31916091	0.234366
Tangerang	588.3656641	0.284967043	12.94854523	0.24634
Serang	206.6765641	0.121649102	5.014181737	0.095392
Tangerang	87.30566406	0.171570975	3.87028654	0.07363
Cilegon	19935.67504	0.034311229	26.15372827	0.497562
Serang	365.4310141	0.053675003	4.428827228	0.084256
Kota Tangsel	308.2219141	0.130606627	6.344747795	0.120706

INDEKS WILLIAMSON

2017

Kab/Kota	$(Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})$	F_i / n_i	$\text{akar} ((Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})) * F_i / n_i$	IW
Pandeglang	1556.3025	0.096817763	12.27508558	0.233528
Lebak	1640.25	0.103477381	13.02799965	0.247851
Tangerang	693.2689	0.287975894	14.12956938	0.268808
Serang	237.16	0.119984881	5.334380418	0.101484
Tangerang	105.0625	0.171904201	4.24978648	0.08085
Cilegon	22353.2401	0.034149866	27.62897322	0.525628
Serang	394.0225	0.053550083	4.593466832	0.087388
Kota Tangsel	332.3329	0.132139931	6.626797596	0.126072



INDEKS WILLAMSON

2018

Kab/Kota	$(Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})$	F_i / n_i	$\text{akar} ((Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})) * F_i / n_i$	IW
Pandeglang	1877.705556	0.095274717	13.37527064	0.254458
Lebak	1985.816406	0.102114812	14.24012879	0.270912
Tangerang	898.3507563	0.29099841	16.16844587	0.307597
Serang	306.6876563	0.118324053	6.023995901	0.114604
Tangerang	95.99100625	0.17221036	4.065789678	0.07735
Cilegon	28468.96926	0.033988493	31.10654843	0.591787
Serang	496.0642563	0.053413562	5.147480829	0.097928
Kota Tangsel	435.6612563	0.133675594	7.631335224	0.145182

INDEKS WILLAMSON

2019

Kab/Kota	$(Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})$	F_i / n_i	$\text{akar} ((Y_i - \bar{Y}) * (Y_i - \bar{Y})) * F_i / n_i$	IW
Pandeglang	2577.719827	0.093747921	15.54528465	0.295742
Lebak	2023.312852	0.100763995	14.27855333	0.271643
Tangerang	893.4868266	0.294012075	16.20789671	0.308347
Serang	261.5093266	0.116682922	5.523918198	0.10509
Tangerang	129.9315016	0.172495281	4.734191675	0.090066
Cilegon	29329.55945	0.033820245	31.49496625	0.599177
Serang	443.5762516	0.053267283	4.860874585	0.092476
Kota Tangsel	391.2978516	0.135210279	7.273753611	0.13838



Lampiran 2: Hasil Regresi

a. ESTIMASI HASIL COMMON EFFECT

Dependent Variable: Y?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 10/10/20 Time: 05:13
 Sample: 2014 2019
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 8
 Total pool (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.216058	0.047110	4.586199	0.0000
X1?	-0.181272	0.050213	-3.610055	0.0008
X2?	0.015458	0.063320	0.244133	0.8083
X3?	0.021997	0.004219	5.213423	0.0000
R-squared	0.426196	Mean dependent var		0.208214
Adjusted R-squared	0.387073	S.D. dependent var		0.144734
S.E. of regression	0.113312	Akaike info criterion		-1.437687
Sum squared resid	0.564943	Schwarz criterion		-1.281754
Log likelihood	38.50449	Hannan-Quinn criter.		-1.378760
F-statistic	10.89374	Durbin-Watson stat		0.436735
Prob(F-statistic)	0.000018			

b. ESTIMASI HASIL FIXED EFFECT

Dependent Variable: Y?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 10/10/20 Time: 05:14
 Sample: 2014 2019
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 8
 Total pool (balanced) observations: 48
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.091919	0.042475	2.164080	0.0370
X1?	-0.031058	0.008762	-3.544573	0.0011
X2?	0.205794	0.071048	2.896539	0.0063
X3?	0.001731	0.000400	4.326911	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
KABPANDEGLANG-C	0.089700			
KABLEBAK-C	0.122093			
KABTANGERANG-C	0.015465			
KABSERANG-C	-0.043391			
KOTTANGERANG-C	-0.135112			
KOTCILEGON-C	0.239173			
KOTSERANG-C	-0.122906			



KOTTANGSEL-C -0.165021

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.971019	Mean dependent var	0.237292
Adjusted R-squared	0.963186	S.D. dependent var	0.050493
S.E. of regression	0.024922	Sum squared resid	0.022982
F-statistic	123.9677	Durbin-Watson stat	0.866361
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.971342	Mean dependent var	0.208214
Sum squared resid	0.028216	Durbin-Watson stat	0.582777

c. ESTIMASI HASIL RANDOM EFFECT

Dependent Variable: Y?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/10/20 Time: 05:14
 Sample: 2014 2019
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 8
 Total pool (balanced) observations: 48
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.092492	0.066716	1.386350	0.1726
X1?	-0.028410	0.038754	-0.733094	0.4674
X2?	0.206073	0.093437	2.205488	0.0327
X3?	0.001243	0.001418	0.876332	0.3856
Random Effects (Cross)				
KABPANDEGLANG--C	0.086693			
KABLEBAK--C	0.119468			
KABTANGERANG--C	0.016752			
KABSERANG--C	-0.042587			
KOTTANGERANG--C	-0.134362			
KOTCILEGON--C	0.238766			
KOTSERANG--C	-0.121535			
KOTTANGSEL--C	-0.163196			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.084654	0.9094
Idiosyncratic random	0.026726	0.0906

Weighted Statistics

R-squared	0.107588	Mean dependent var	0.026616
-----------	----------	--------------------	----------



Adjusted R-squared	0.046741	S.D. dependent var	0.031694
S.E. of regression	0.030944	Sum squared resid	0.042132
F-statistic	1.768189	Durbin-Watson stat	0.377212
Prob(F-statistic)	0.167154		

Unweighted Statistics

R-squared	0.087698	Mean dependent var	0.208214
Sum squared resid	0.898214	Durbin-Watson stat	0.017694

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: AAPOL
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	107.704820	(7,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	146.990221	7	0.0000

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: AAPOL
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.985504	3	0.0004

